



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 AGUSTUS 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 AGUSTUS 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLOH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan perubahan terhadap RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024, ditemukan berbagai kondisi yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen tersebut, diantaranya:

1. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024. Terdapat beberapa indikator baik indikator makro dan indikator kinerja daerah yang sudah tercapai pada tahun sebelumnya atau target yang dicantumkan diperkirakan tidak akan tercapai karena berdasarkan capaian tahun sebelumnya masih jauh dari target 2024;
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat *mandatory*;
5. Evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendongkrak pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan

Penyusunan Perubahan RKPD selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pada pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD Kota Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
34. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
35. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
36. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 12);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, yang mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 serta RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Nasional tahun 2024. Untuk selanjutnya RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, selaras, konsisten antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Tasikmalaya serta harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan serta kondisi saat ini tentang masyarakat akan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan perubahannya, dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan perubahannya harus memperhatikan dan mengacu pada berbagai substansi perencanaan, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKP nasional. Kebijakan dan program prioritas nasional harus didukung guna mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya;
2. Sama halnya dengan RKP Nasional, perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya. Perencanaan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat dan perubahannya harus menjadi acuan

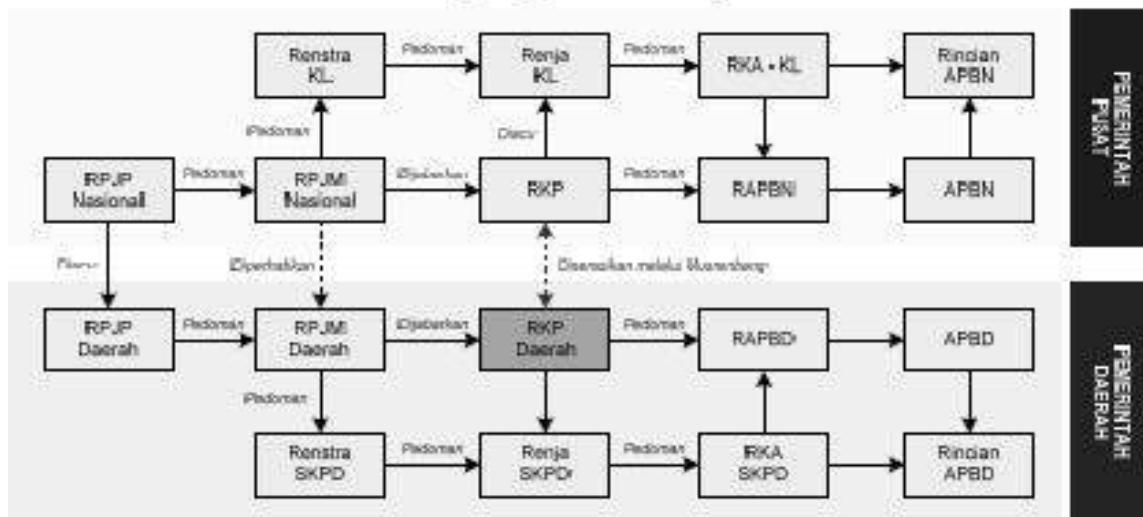
dan mendapat dukungan dari daerah kabupaten/kota guna mendorong pencapaian target pembangunan provinsi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya;

3. Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2024 menjadi acuan bagi penyusunan perubahan Renja PD tahun 2024 sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan perubahan Renja PD dengan penyusunan RKPD. Selain itu perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Selain mengacu dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, penyusunan perubahan RKPD pun harus memperhatikan dokumen perencanaan tentang penataan dan pemanfaat ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan pembangunan sesuai dengan arah penataan dan pemanfaat ruang di Kota Tasikmalaya.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2.

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penaganggaran Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2024;

3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika

Dokumen Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum pada pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2024 dalam periode dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

1.5 Sistematika

Menjelaskan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan tentang capaian indikator makro

pembangunan dan capaian indikator kinerja utama yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024.

2.2 Capaian Program dan Kegiatan

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

2.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat capaian program dan kegiatan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi ekonomi daerah Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah berdasarkan RPD Kota Tasikmalaya 2023 – 2026 pada tahun rencana, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah, indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta PD pelaksana, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro dan indikator kinerja utama, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan triwulan II Tahun 2024.

2.1. Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

2.1.1.Capaian Indikator Makro

Indikator Makro Pembangunan merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.1.
Realisasi dan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	REALISASI	TARGET RPD	TARGET RKPD
		2023	2024	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,47	74,28	74,28
2	PDRB Perkapita ADH Berlaku	36,95	34,35	34,35
3	PDRB ADH Berlaku	27,41	25,21	25,21
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,96	5,69	5,69
5	Inflasi	2,84	2,65	3,11
6	Indeks gini	0,428	0,380	0,380
7	Angka Kemiskinan	11,53	11,33	11,33
8	Tingkat Pengangguran terbuka	6,55	7,18	5,77

Sumber : RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RPKD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

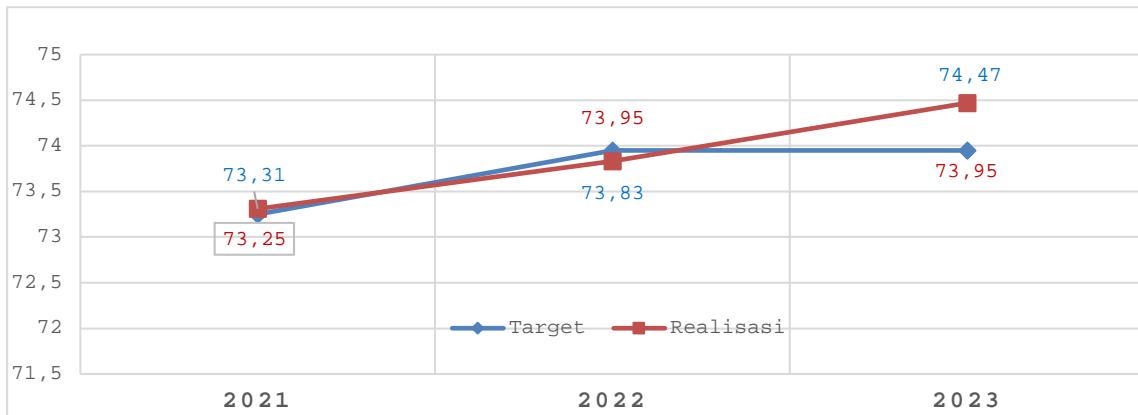
IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 indeks yang digabung menjadi indeks tunggal yaitu Umur panjang dan hidup sehat (Indeks Harapan Hidup), Pengetahuan dalam bentuk Indeks Pendidikan serta Standar hidup layak dengan Indeks Daya Beli. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua

aspek, yaitu : posisi wilayah relatif terhadap wilayah lainnya yang berdekatan dan mengkaji kemajuan pencapaian beragam program yang telah dilakukan.

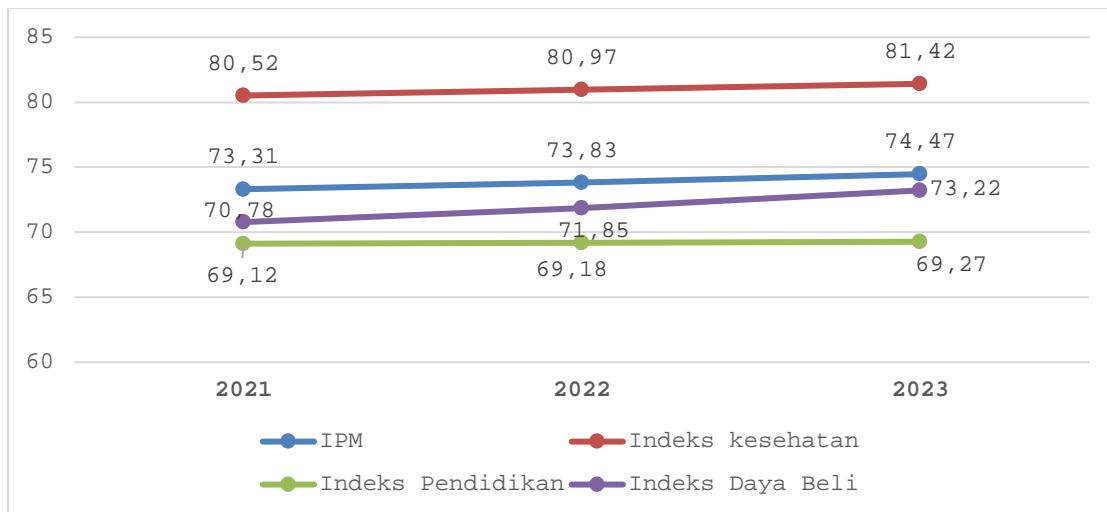
Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Target & Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya
2021-2023 (Point)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya. 2024

Gambar 2.2.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023



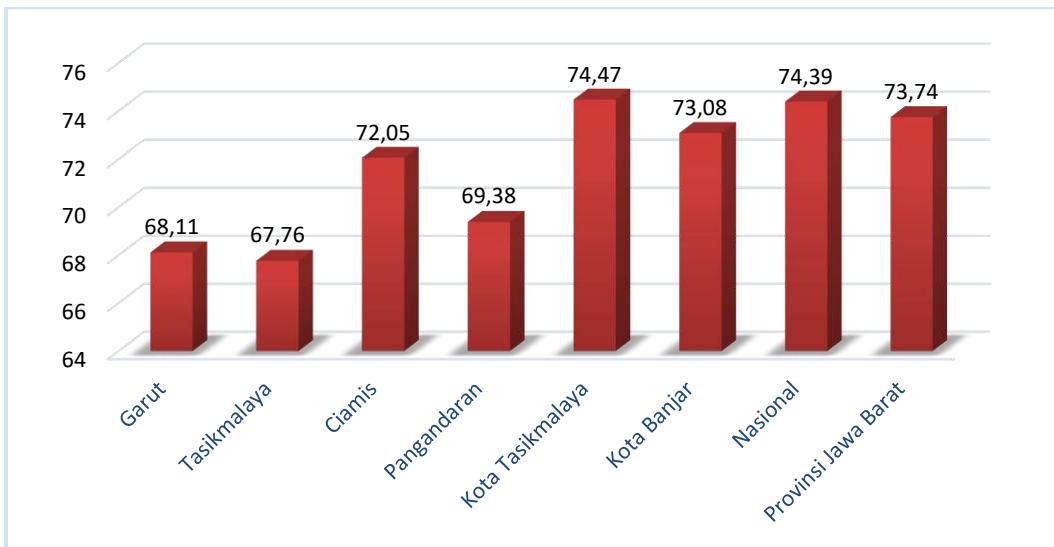
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya. 2024

Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 81,42 tahun, meningkat 0,45 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan secara indeks sebesar 0,09. Peningkatan tertinggi secara Indeks berada di Indeks Daya Beli yaitu sebesar 1,37 menggambarkan dimensi standar hidup layak yang diukur oleh rata – rata pengeluaran real perkapita tingkat pendapatan penduduk Kota Tasikmalaya meningkat.

Keterbandingan nilai IPM antar wilayah terdekat (priangan timur) dan dibandingkan dengan capaian IPM provinsi dan nasional, capaian IPM Kota Tasikmalaya tahun 2023 lebih tinggi dari capaian nasional, provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di priangan timur, seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3.

Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya, Nasional, Jawa Barat dan Daerah di Priangan Timur



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

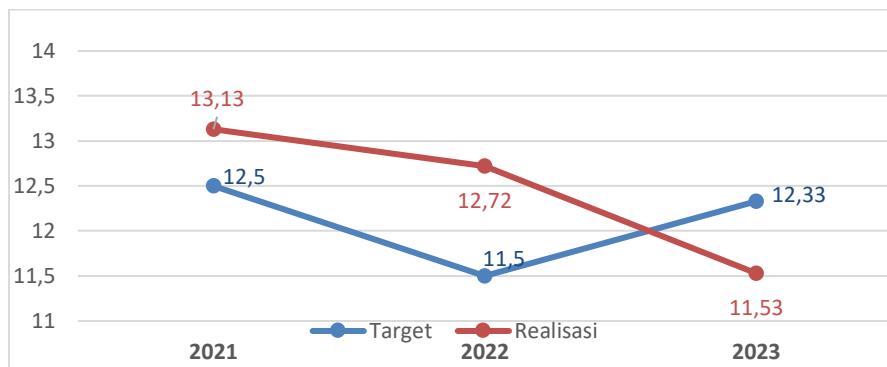
Tabel 2.2.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2021 - 2023

Indikator	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	13,13	12,72	11,53
Penduduk Miskin (ribu orang)	89,46	87,13	79,37
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	480.341	498.711	537.497
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,41	2,34	1,62
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,69	0,65	0,32

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

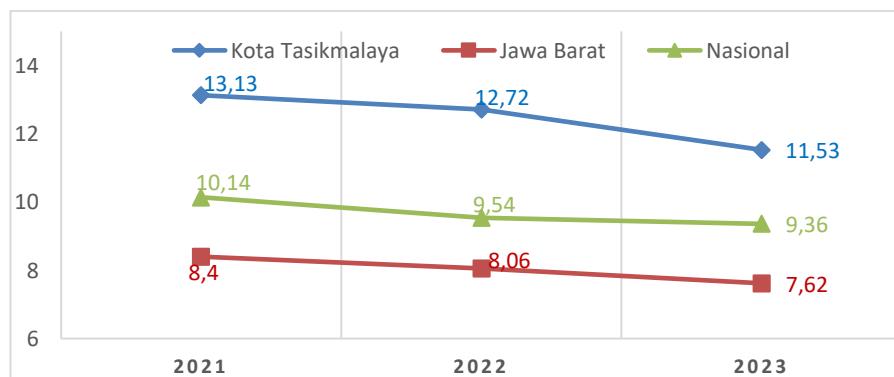
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 11,53%, namun masih berada pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.4.
Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023
(Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Gambar 2.5.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat selama periode yang cukup lama menjadi daerah kategori kota/kabupaten dengan jumlah penduduk miskinnya secara prosentase tertinggi, namun sejak tahun 2022 kondisi tersebut berubah menjadi peringkat 3 (tiga) terbawah secara prosentase kemiskinan. Pada tahun 2023 kemiskinan secara makro ini menurun signifikan 1,19 persen dari tahun sebelumnya tetapi tidak menurunkan peringkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Keberhasilan menurunkan kemiskinan merupakan usaha terpadu seluruh tingkatan lembaga, masyarakat dan seluruh aspek yang berkepentingan serta kebijakan – kebijakan yang terselenggara baik yang tercatat maupun tidak guna memperbaiki kesejahteraan secara umum di Kota Tasikmalaya. (Tercatat Perda Kemiskinan No 3 Tahun 2022 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya telah terbentuk).

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

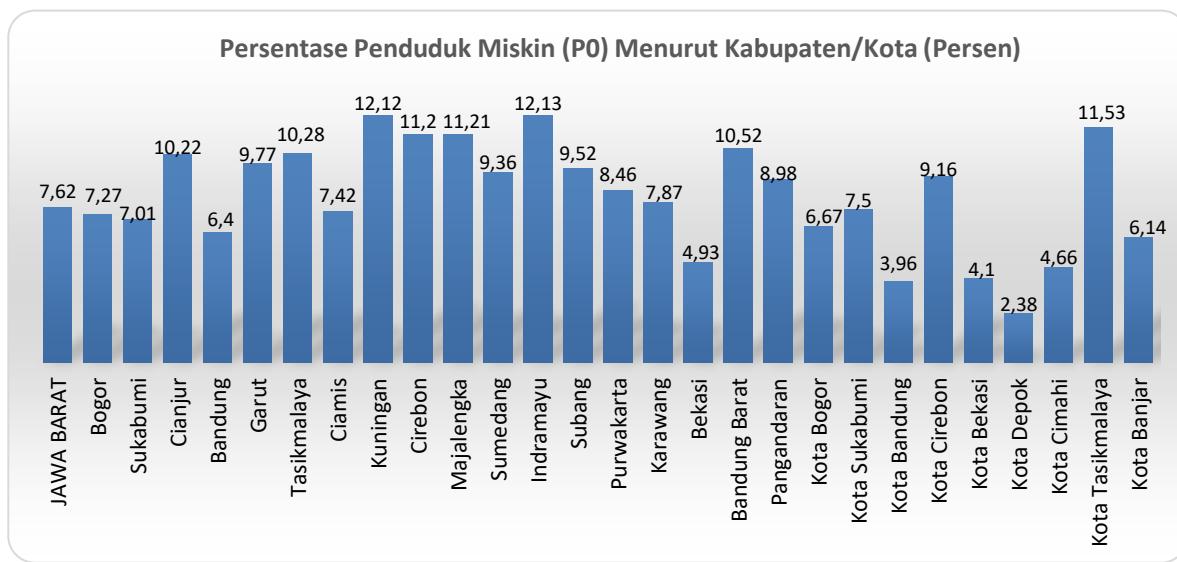
Tabel 2.3.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat

Nama Wilayah	Percentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
JAWA BARAT	8,40	8,06	7,62
Bogor	8,13	7,73	7,27
Sukabumi	7,70	7,34	7,01
Cianjur	11,18	10,55	10,22

Nama Wilayah	Percentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Bandung	7,15	6,80	6,4
Garut	10,65	10,42	9,77
Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
Ciamis	7,97	7,72	7,42
Kuningan	13,10	12,76	12,12
Cirebon	12,30	12,01	11,2
Majalengka	12,33	11,94	11,21
Sumedang	10,71	10,14	9,36
Indramayu	13,04	12,77	12,13
Subang	10,03	9,75	9,52
Purwakarta	8,83	8,70	8,46
Karawang	8,95	8,44	7,87
Bekasi	5,21	5,01	4,93
Bandung Barat	11,30	10,82	10,52
Pangandaran	9,65	9,32	8,98
Kota Bogor	7,24	7,10	6,67
Kota Sukabumi	8,25	8,02	7,5
Kota Bandung	4,37	4,25	3,96
Kota Cirebon	10,03	9,82	9,16
Kota Bekasi	4,74	4,43	4,1
Kota Depok	2,58	2,53	2,38
Kota Cimahi	5,35	5,11	4,66
Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
Kota Banjar	7,11	6,73	6,14

Sumber: BPS Jawa Barat, 2024.

Gambar 2.6.
Kemiskinan Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat, 2024.

Peringkat kemiskinan Kota Tasikmalaya menduduki tempat ke 25 sejak tahun 2022 yang sejak tahun 2008 (14 tahun) Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2023 Kota Tasikmalaya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,53 persen sehingga Kota Tasikmalaya tidak lagi menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 6,59 ribu jiwa.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023*
Bogor	107,25	146,12	47,22
Sukabumi	24,61	19,90	24,05
Cianjur	57,04	36,16	11,89
Bandung	66,96	56,43	46,81
Garut	30,32	82,17	9,55
Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12
Ciamis	5,51	17,90	1,32
Kuningan	24,03	31,89	15,70
Cirebon	64,44	81,89	36,64
Majalengka	43,84	24,13	10,64
Sumedang	31,71	36,82	6,37
Indramayu	75,82	53,05	38,55
Subang	57,51	35,44	34,61
Purwakarta	18,58	16,93	10,19
Karawang	28,22	64,02	17,89
Bekasi	56,00	25,82	19,82
Bandung Barat	28,25	33,59	15,04
Pangandaran	5,61	5,93	2,65
Kota Bogor	13,59	14,45	4,93
Kota Sukabumi	9,98	4,49	2,54
Kota Bandung	24,79	25,37	9,14
Kota Cirebon	13,06	5,32	1,09
Kota Bekasi	33,25	61,75	0,00
Kota Depok	9,44	17,57	0,00
Kota Cimahi	8,34	2,63	2,98
Kota Tasikmalaya	27,17	23,88	6,59
Kota Banjar	2,08	2,49	0,08
Provinsi Jawa Barat	895,64	941,86	403,38

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023.

*Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 22.845,56 Milyar pada tahun 2021 dan menjadi 27.411,43 Milyar pada tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2023 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.100,18	1.202,36	1.319,54
B	Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,99	1,99
C	Industri Pengolahan	3.159,59	3.450,78	3.669,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	3,15	3,30
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	96,31	97,44	100,96
F	Konstruksi	3.700,54	3.975,54	4.397,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4.954,11	5.416,72	5.929,52

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	2.072,51	2.320,07	2.763,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.209,65	1.440,33	1.650,46
J	Informasi dan Komunikasi	978,57	1.038,06	1.121,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.396,31	2.596,50	2.708,69
L	Real Estat	397,89	438,12	472,71
M,N	Jasa Perusahaan Activities	240,39	288,50	321,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	921,48	918,53	954,97
P	Jasa Pendidikan	511,52	534,79	592,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	547,86	605,46	669,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya	553,75	646,33	733,97
	Produk Domestik Bruto	22.845,56	24.974,68	27.411,43

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada - 15 -able berikut:

Tabel 2.6.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2021 – 2023 (Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	660,75	690,75	718,53
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,38	1,33
C	Industri Pengolahan	2.194,62	2.312,87	2.390,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,74	1,80
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	63,01	63,00	64,65
F	Konstruksi	2.475,68	2.577,18	2.762,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.681,31	3.841,48	4.042,74
H	Transportasi dan Pergudangan/	1.439,91	1.542,85	1.714,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	771,50	879,72	961,19
J	Informasi dan Komunikasi	932,45	989,33	1.067,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.552,58	1.539,33	1.574,86
L	Real Estat	319,77	341,52	361,79
M,N	Jasa Perusahaan Activities	168,53	193,83	207,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	591,46	591,23	605,12
P	Jasa Pendidikan	314,93	321,55	343,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Activities	386,04	416,11	442,75
R,S,T,U	Jasa LainnyaActivities	425,66	477,17	519,85
	Produk Domestik Bruto	15.981,25	16.781,04	17.781,93

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

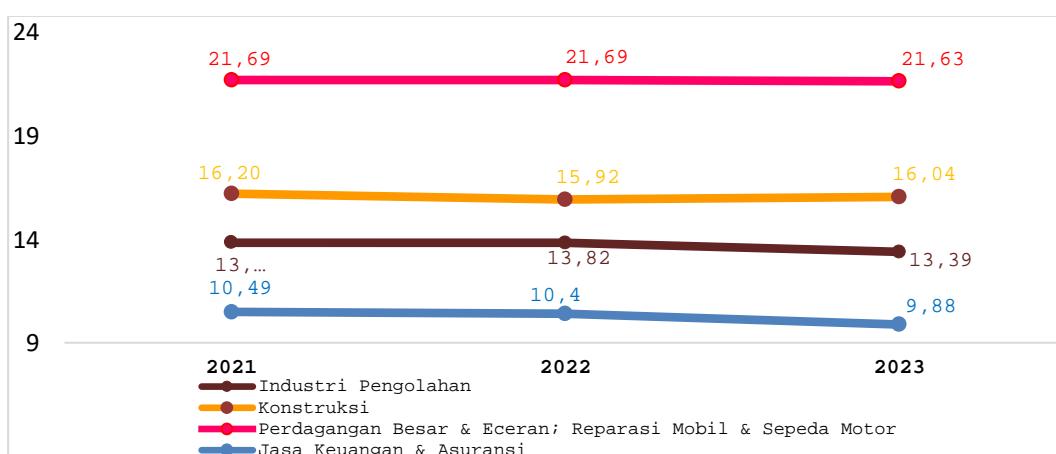
Tabel 2.7.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 – 2023 (Persen)

	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,82	4,81	4,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	13,83	13,82	13,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,42	0,39	0,37
F	Konstruksi	16,20	15,92	16,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	21,69	21,69	21,63
H	Transportasi dan Pergudangan	9,07	9,29	10,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	5,77	6,02
J	Informasi dan Komunikasi	4,28	4,16	4,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	10,49	10,40	9,88
L	Real Estat	1,74	1,75	1,72
M,N	Jasa Perusahaan	1,05	1,16	1,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,68	3,48
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,14	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	2,40	2,42	2,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya Activities	2,42	2,59	2,68
	Produk Domestik Bruto/	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Selama tiga tahun terakhir (2021 – 2023) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2021 s.d. 2023 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2021 s.d 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.8.
Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2021-2023 (Persen)



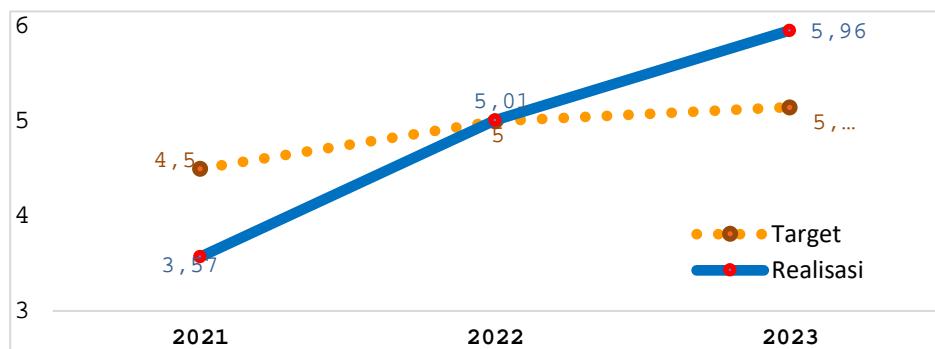
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2023, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,04 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,39 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,88 persen.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota tasikmalaya tercatat 5,96 persen, seiring dengan pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian yang semakin baik. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

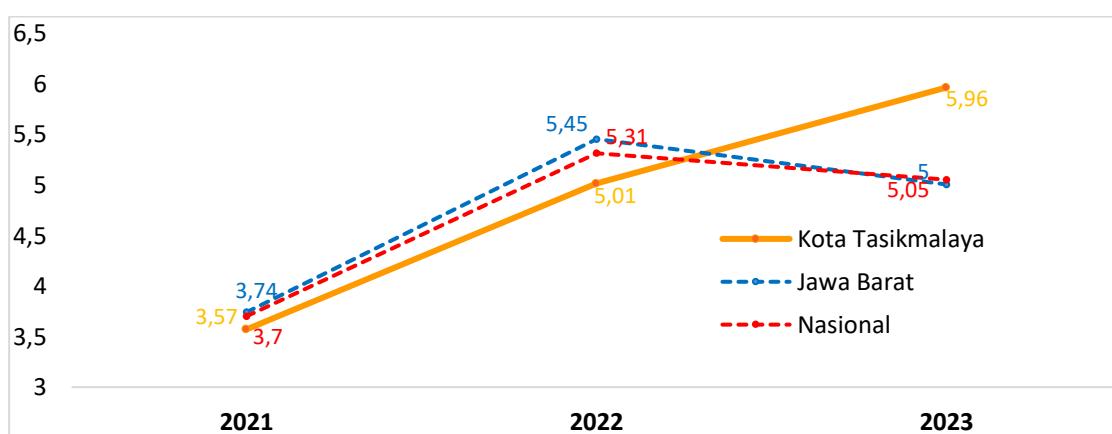
Gambar 2.9.
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
2021 - 2023 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2023 lebih tinggi. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.

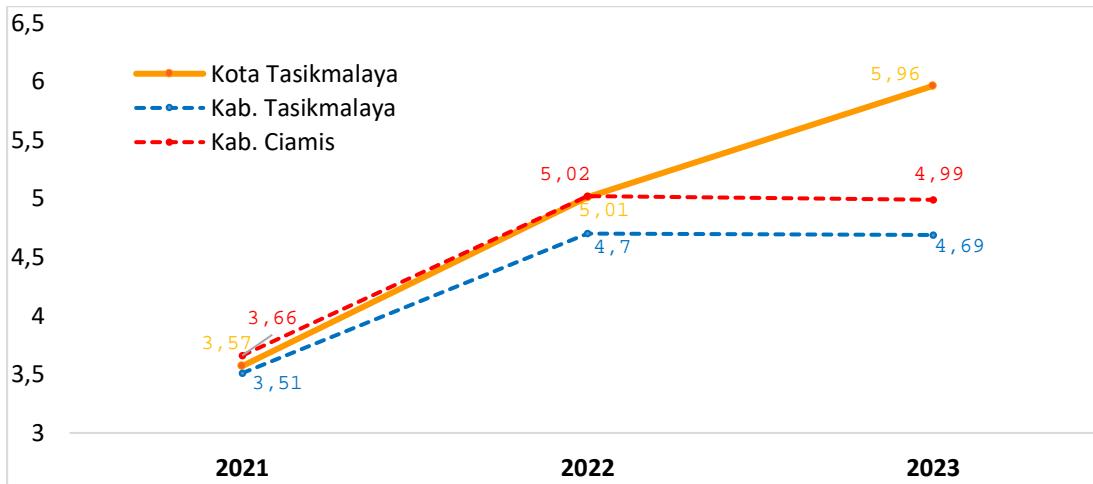
Gambar 2.10.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2023 (persen)



Sumber: BPS, 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya berada di atas LPE Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2021 - 2023



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

5. PDRB Menurut Pengeluaran

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
PDRB menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2023

Komponen PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69.67	69.84	70,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.29	2.21	2,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.87	10.26	10,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.15	32.32	32,72
Perubahan Inventor	-0.65	-0.22	-0,20
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-15.32	-14.41	-16,08
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100,00

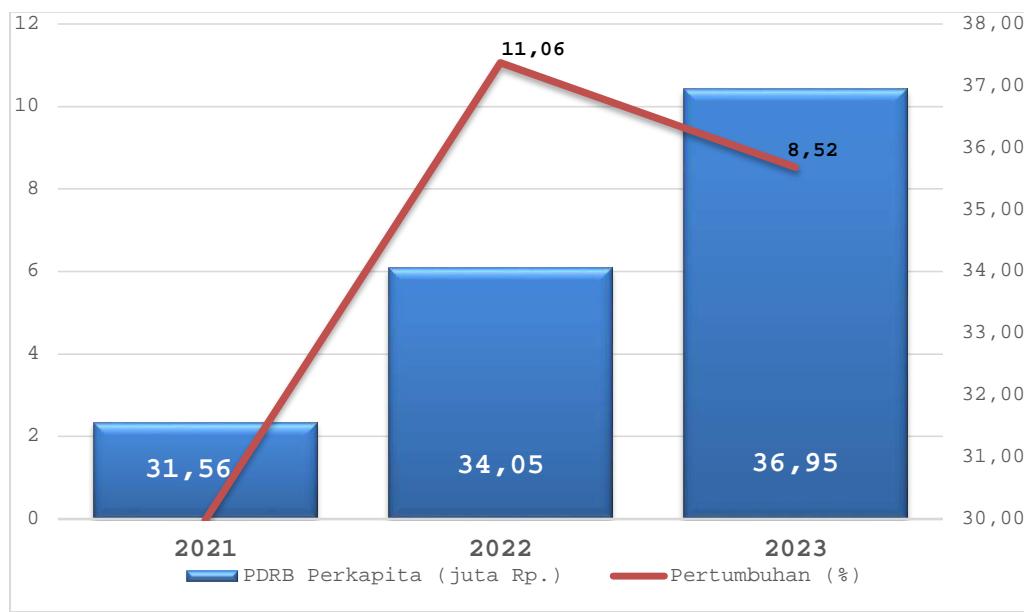
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB pengeluaran yaitu 70,99 persen atau naik sebesar 1,15 persen dari tahun 2022. Adapun pembentukan modal tetap bruto mengalami peningkatan dari 32,32 persen pada tahun 2022 menjadi 32,72 persen pada tahun 2023.

6. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya tahun 2023 sebesar Rp.36,95 juta mengalami peningkatan sebesar 8,52 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.34,05 juta. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik pada tahun 2023.

Gambar 2.12.
Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2021-2023

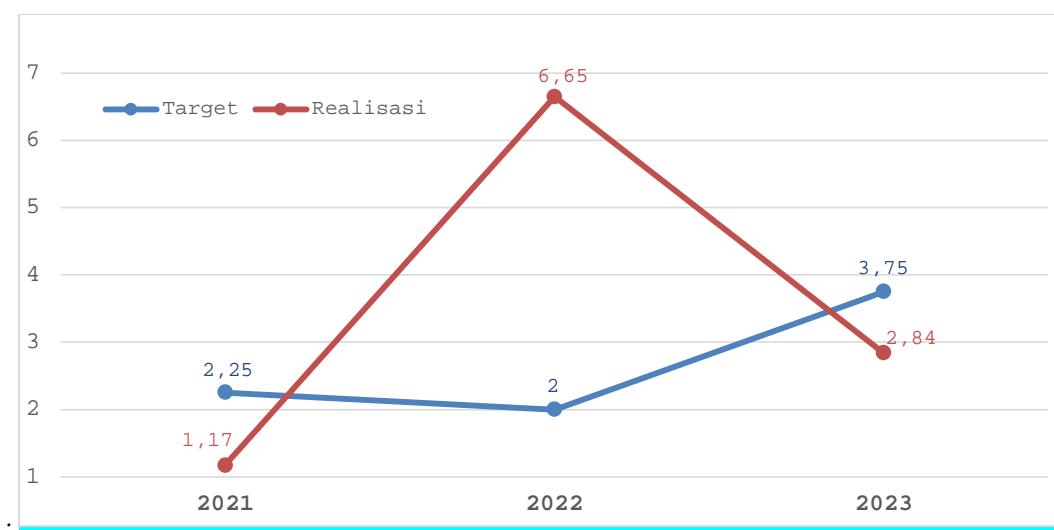


Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2024.

7. Inflasi

Inflasi Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat relatif rendah dan terkendali yaitu 1,17 persen, namun pada tahun 2022 inflasi Kota Tasikmalaya tercatat 6,65 persen, hal ini dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (Gas) dan kenaikan harga telor ayam ras yang terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2023, inflasi Kota Tasikmalaya semakin terkendali dan tercatat 2,84 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.13.
Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya, 2021-2023 (Persen)



Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021, 2022, 2023.
BPS Kota Tasikmalaya, 2024

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 565.093 orang, dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 369.778 orang atau 65,44 persen, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 195.315 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9.

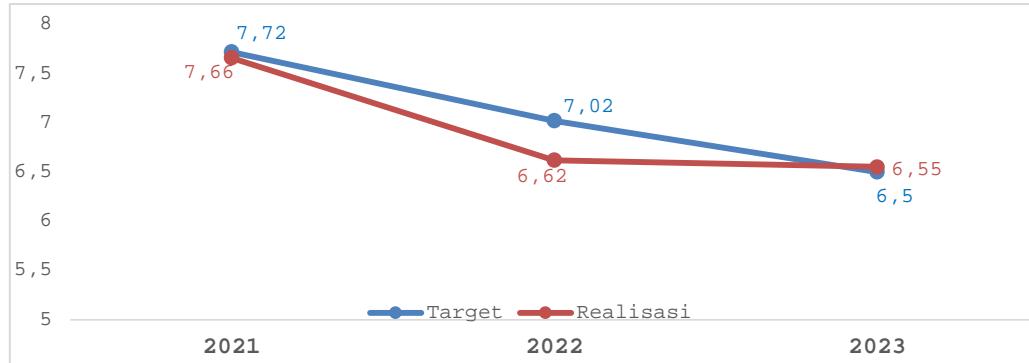
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2023

Kategori	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	342.585	347.063	369.778
1. Bekerja	316.349	324.099	345.544
2. Pengangguran Terbuka	26.236	22.964	24.234
Bukan Angkatan Kerja	178.418	178.909	195.315
Jumlah	521.003	525.972	565.093
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,34	93,38	93,45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	65,75	65,98	65,44
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66	6,62	6,55

Sumber: Data Sakernas BPS Tahun 2023

Gambar 2.14.

Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2023
(Persen)



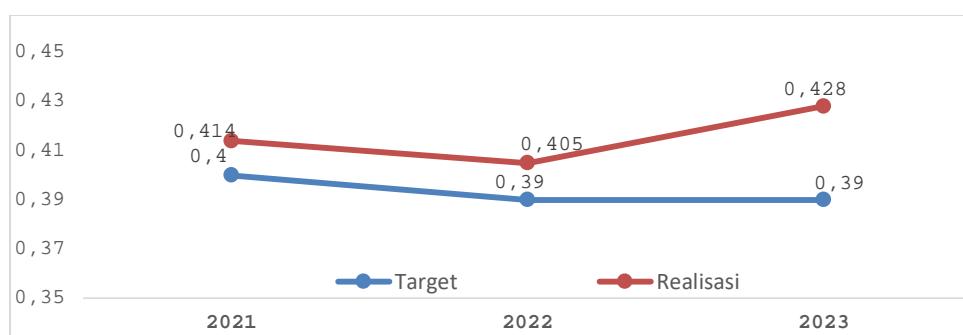
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Indeks Gini di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.15.
Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya, 2021-2023 (Point)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

2.1.2.Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.857-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Adapun capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2023	Target RPD (Tahun 2024)	Target RKPD (Tahun 2024)
1	Angka kemiskinan	(%)	11,53	11,33	11,33
2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Poin	100	90	90
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	9,54	9,89	9,89
4	Harapan Lama Sekolah	Poin	13,49	13,52	13,52
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Poin	95,73	75	75
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,92	72,69	72,69
7	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Poin	98,12	80	80
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	1,27	0,61	0,61
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,81	60,10	60,10
10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,96	91,94	91,94
11	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	99,67	100	100
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (114,69)*	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,96	5,69	5,69

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2023	Target RPD (Tahun 2024)	Target RKPD (Tahun 2024)
14	PDRB Perkapita	Juta / Tahun/ Kapita	36,95	34,35	34,35
15	Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/ Kapita	11,06	10,531	10,580
16	Indeks Gini	Poin	0,428	0,380	0,380
17	Inflasi	%	2,84	2,65	3.11
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,55	7,18	5,77
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	8.968,07	8.283,45	8.283,45
20	Indeks kemantapan jalan	Poin	65,47	62,05	62,05
21	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	23,33	31,77	31,77
22	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Poin	98,22	94,74	94,74
23	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	99,29	100	100
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,02	58,15	58,15
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	82,17	99	99
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori /Poin	Baik 87,12	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori /Poin	Inovatif (46,7)	Inovatif (52,43)	Inovatif (52,43)
28	Indeks SPBE	Kategori /Poin	Baik (3,25)	Baik (3,0)	Baik (3,0)
29	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	WTP
30	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori /Poin	BB (71,83)	BB (72,50- 75,00)	BB (72,50- 75,00)
31	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2024.

2.2. Capaian Program dan Kegiatan

APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 terdiri dari 170 program, 527 kegiatan dan 1.689 sub kegiatan. Pada triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan 162 program dan 452 kegiatan oleh 36 Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Sampai dengan 30 Juni 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp.)	(Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)		
1	DINAS PENDIDIKAN	5	15	68	535.714.093.106	174.035.118.975	39,55	32,49	SR	SR
2	DINAS KESEHATAN	5	25	108	427.589.254.786	189.269.304.748	53,18	44,26	R	SR
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10	21	53	140.794.254.614	21.517.934.018	3,22	15,28	SR	SR
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14	44	16.325.204.038	5.026.031.119	13,28	30,79	SR	SR
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	11	41	16.374.665.080	7.735.762.525	58,09	47,24	R	SR
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	15	55	10.695.789.000	4.677.699.224	49,32	43,73	SR	SR
7	DINAS SOSIAL	6	14	51	23.209.420.900	11.844.273.494	49,32	51,03	SR	R
8	DINAS TENAGA KERJA	5	16	47	7.821.709.200	3.505.382.394	63,06	44,82	R	SR
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	11	24	57	30.853.388.150	15.530.614.550	24,21	50,34	SR	R
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	10	27	33.918.045.300	15.335.390.134	62,50	45,21	R	SR
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	16	42	9.848.407.900	4.928.625.420	53,75	50,04	R	R
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	19	58	15.519.531.100	5.045.921.769	50,02	32,51	R	SR

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp.)	(Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)		
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	14	30	39.064.769.100	23.503.571.522	31,28	60,17	SR	R
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	13	39	17.706.321.300	7.487.583.300	62,67	42,29	R	SR
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	10	14	18.519.364.800	7.620.984.541	29,30	41,15	SR	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	10	39	7.995.267.700	3.213.326.960	66,60	40,19	S	SR
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8	17	45	19.298.953.357	4.323.187.548	38,26	22,40	SR	SR
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	13	42	6.422.027.100	2.677.434.176	30,32	41,69	SR	SR
19	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	81	83.044.574.975	48.637.432.574	57,52	58,57	R	R
20	SEKRETARIAT DPRD	2	17	63	61.834.339.500	31.106.433.637	42,78	50,31	SR	R
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	18	71	16.899.581.600	6.656.515.405	28,39	39,39	SR	SR
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	13	81	44.127.412.351	11.268.642.419	52,17	25,54	R	SR
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	9	47	25.642.546.080	9.753.856.859	18,52	38,04	SR	SR
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	42	12.980.517.000	5.712.755.094	44,47	44,01	SR	SR
25	INSPEKTORAT	3	12	41	16.324.501.700	7.496.735.503	42,78	45,92	SR	SR

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp.)	(Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)		
26	KECAMATAN CIHIDEUNG	4	14	40	10.033.369.700	4.395.752.846	54,03	43,81	R	SR
27	KECAMATAN CIPEDES	5	14	37	8.243.067.500	4.119.031.291	50,03	49,97	R	SR
28	KECAMATAN TAWANG	4	13	36	9.209.712.800	4.917.035.468	66,43	53,39	S	R
29	KECAMATAN INDIHIANG	4	14	36	10.026.524.800	5.108.708.426	54,05	50,95	R	R
30	KECAMATAN KAWALU	5	14	38	14.873.883.100	7.696.181.492	60,78	51,74	R	R
31	KECAMATAN CIBEUREUM	5	14	35	13.611.302.700	6.773.062.507	45,75	49,76	SR	SR
32	KECAMATAN TAMANSARI	4	14	37	11.342.518.500	5.913.322.269	64,72	52,13	R	R
33	KECAMATAN MANGKUBUMI	4	12	37	11.793.351.300	5.205.786.720	52,49	44,14	R	SR
34	KECAMATAN BUNGURSARI	4	13	34	10.834.032.400	5.457.693.858	49,53	50,38	SR	R
35	KECAMATAN PURBARATU	5	14	36	9.462.252.900	2.338.297.867	50,35	24,71	R	SR
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	40	58.403.153.730	39.921.654.811	4,29	68,36	SR	S

Keterangan : ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah.

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada APBD Tahun 2024. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

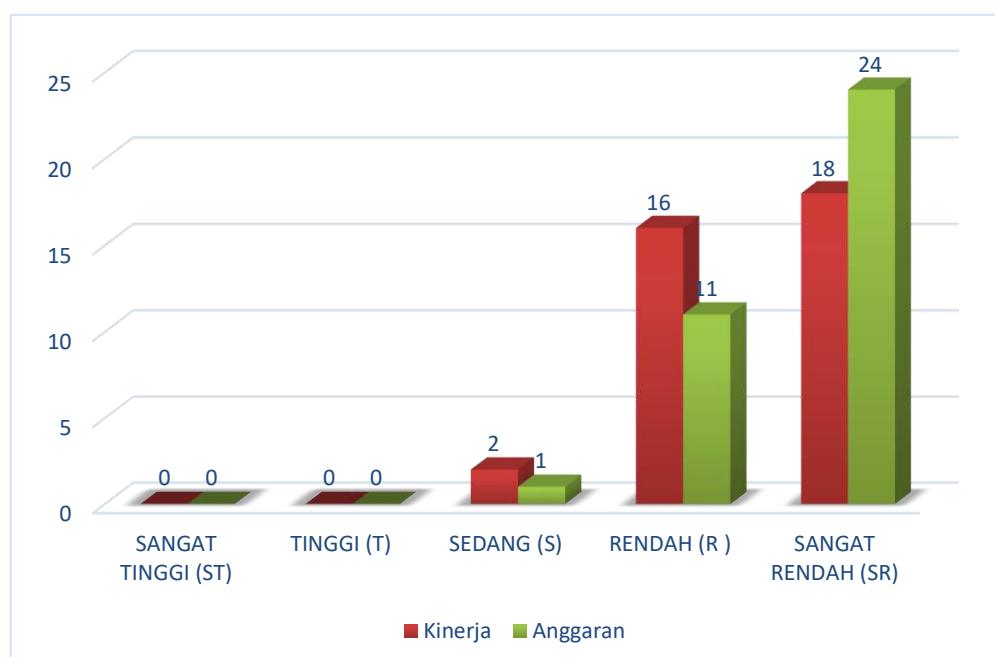
Tabel 2.12.
Realisasi APBD Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)
170	527	1689	1.806.357.109.167	719.757.045.463	43,92	44,92

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 realisasi kinerja mencapai 44,92%, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 berpredikat sangat rendah dan untuk realisasi anggaran mencapai 44,92% sehingga dapat dikatakan bahwa capaian realisasi anggaran triwulan II tahun 2024 berpredikat sangat rendah.

Selanjutnya, predikat capaian kinerja dan keuangan dari 36 perangkat daerah secara keseluruhan masih tergolong sangat rendah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

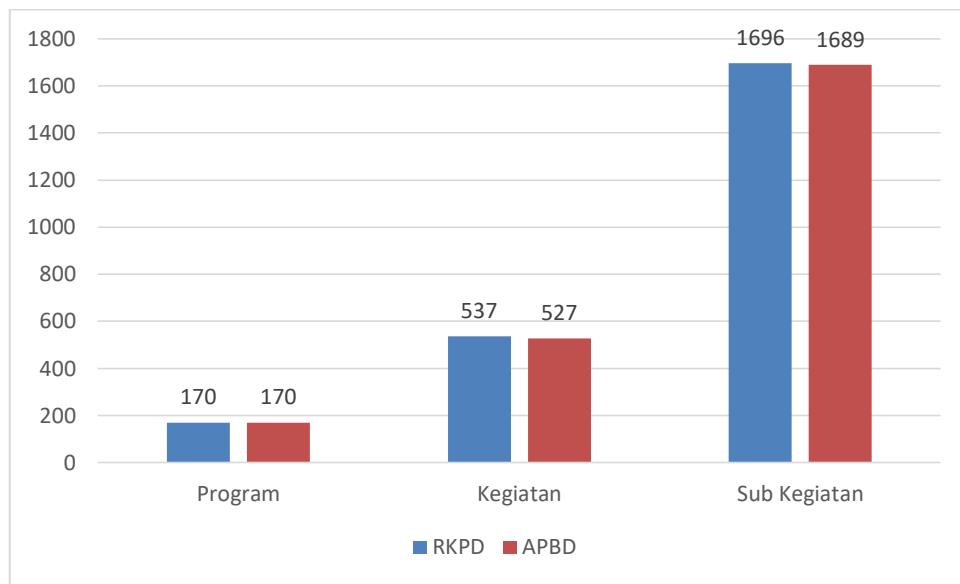
Gambar 2.16.
Predikat Kinerja dan Keuangan PD Tahun 2024



Evaluasi dilakukan pada jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 dengan jumlah program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024. Berikut disajikan perbandingan jumlah program dan kegiatannya.

Gambar 2.17.

Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD dengan APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

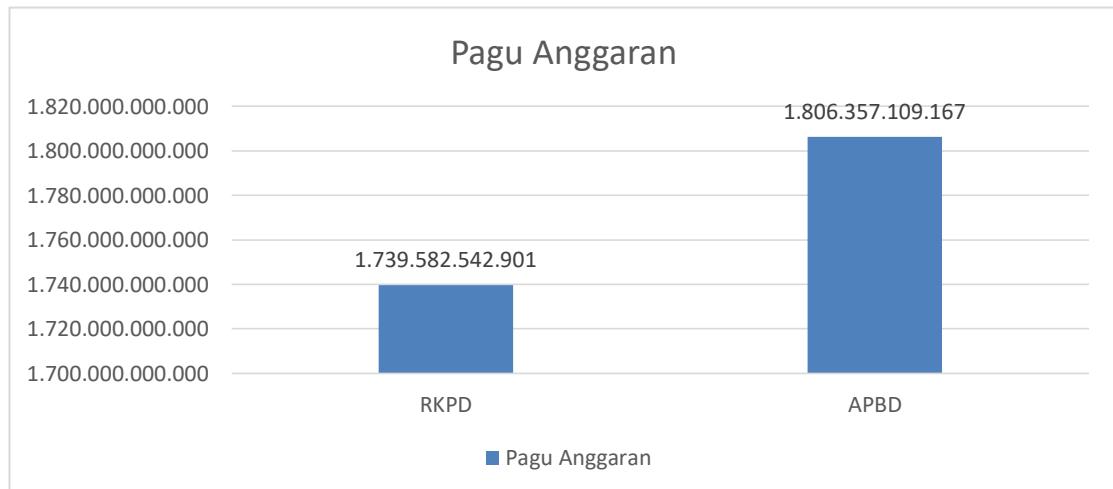


Sumber : RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan APBD hampir sama. Sedangkan untuk pagu anggaran belanja pada RKPD dan APBD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.18.

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja antara RKPD dengan APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2024



Tabel 2.13.
Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Program
Triwulan II Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Dinas Pendidikan		535.714.093.106		63.003.603.176		111.031.515.799					174.035.118.975			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190	359.518.661.736	20	61.470.308.076	16	109.756.988.630					36	171.227.296.706	18,92	47,63
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	28238,00	169.481.462.639	633	91.545.100	1.721	633.328.399					2.354	724.873.499	8,34	0,43
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum	250	30.000.000	-	-	250	27.850.000				250	27.850.000	100,00	92,83
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	2	Dokumen	6.093.468.731	0	1.028.750.000	1	586.402.900			1	1.615.152.900	58,50	26,51
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	280		87.500.000	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	259	90.000.000	0,00	0,00	12,00	26945870,00					12	26.945.870	4,63	29,94
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1067	25.000.000	1067	25.000.000	0	0					1.067	25.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1053	25.000.000	1053	25.000.000	0	0					1.053	25.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1035	22.000.000	1035	22.000.000	0	0					1.035	22.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	948	20.000.000	948	20.000.000	0	0					948	20.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1036	20.000.000	1036	20.000.000	0	0					1.036	20.000.000	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
				I		II		III		IV						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			427.589.254.786		95.675.886.257		93.593.418.491						189.269.304.748			
DINAS KESEHATAN			302.992.854.786		57.750.554.372		63.418.742.871						121.169.297.243	9,36	19,96	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100,00	%	175.098.906.458		51.088.366.497		50.380.924.783					101.469.291.280	92,08	57,95	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	90,00	%	122.074.283.460		6.575.397.875		12.528.747.388					914.321	19.104.145.263	52,91	15,65
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100,00	%	1.957.925.526		-		-					0	-	-	-
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN SESUAI STANDAR	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar			731.644.000		6.550.000		65.345.700					202	71.895.700	68,07	9,83
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS			3.130.095.342		80.240.000		443.725.000					2.930	523.965.000	71,69	16,74
RSUD DOKTER SOEKARDJO			124.596.400.000		37.925.331.885		30.174.675.620						140	68.100.007.505	43,75	54,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100,00	%	124.596.400.000		37.925.331.885		30.174.675.620					6	68.100.007.505	50,00	54,66
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	90,00	%	-		-		-					273	-	37,50	-
	Rata-rata capaian kinerja (%)														53,18	22,12
	Predikat kinerja														R	SR
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			144.244.254.614		8.643.948.730		12.873.985.288						21.517.934.018			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,67	Kategori	10.687.280.944		3.331.537.599		2.799.072.175					0,00	6.130.609.774	0,00	57,36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
			I				II		III		IV				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
Daerah Kabupaten/Kota															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPUTR	85,00	Kategori	2.005.132.100		219.050.604		510.924.371				0,00	729.974.975		36,41
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jumlah sungai yang berfungsi optimal	50,00	Per센	32.639.011.000		1.184.018.645		825.139.500				2.009.158.145	0,00	6,16	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spm Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	57,26	Per센	14.835.322.900		418.312.900		113.611.221				0,00	531.924.121	0,00	3,59
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	83,00	Per센	9.787.156.600		435.185.393		149.327.671				0,00	584.513.064	0,00	5,97
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	65,01	Per센	10.255.927.514		1.424.927.514		2.466.678.600				0,00	3.891.606.114	0,00	37,94
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	99,373	Per센	9.360.200.000		528.902.200		1.158.390.150				0,00	1.687.292.350	0,00	18,03
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	51,97%	Per센	53.761.723.556		1.007.220.691		4.727.279.400				0,00	5.734.500.091	0,00	10,67
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	33,66	Per센	60.000.000		1.556.000		2.687.200				0,00	4.243.200	0,00	7,07
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,5	Per센	844.825.000		93.237.184		120.875.000				0,00	214.112.184	0,00	25,34

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II		III		IV			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen perencanaan pemanfaatan, penggunaan , penggunaan, dan kepemilikan tanah sesuai ketentuan	100	Persen	7.675.000							0,00	-	0,00	-
	Rata-rata capaian kinerja (%)												3,22	15,35
	Predikat kinerja												SR	SR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.325.204.038		2.549.100.579		2.476.930.540				5.026.031.119		15,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	5.038.621.100	31,55	1.183.710.541	16	1.194.905.294			47,91	2.378.615.835	47,91	47,21
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20,00	%	6.233.475.840	-	22.953.800	-	33.390.100			-	56.343.900	-	0,90
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8,68	%	1.016.524.060	-	3.318.700	-	724.967.000			-	728.285.700	-	71,64
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,43	%	785.000.000	-	6.011.300	0	480.000.000			0	486.011.300	22,86	61,91
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	100	%	874.705.060	-	227.855.060	-	2.126.800			-	229.981.860	-	26,29
	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	100	%		-		-						-	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	25	%	2.376.877.978	-	1.105.251.178	6	41.541.346			6	1.146.792.524	22,22	48,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										13,28	42,70	
		Predikat kinerja										SR	SR	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				16.374.665.080		4.024.625.344		3.711.137.181			7.735.762.525			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		246		10.310.088.482	46	3.095.236.773	84	2.452.436.481			130	5.547.673.254	54,42	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		330		6.064.576.598	222	929.388.571	20	1.258.700.700			242	2.188.089.271	61,77	
													58,09	
													R	
				10.695.789.000		2.490.742.894		2.186.956.330				4.677.699.224		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			100	%	6.759.789.000	31,02	1.882.328.193	25,05	1.431.431.231			56,07	3.313.759.424	56,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													49,02	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	57,58	%	2.511.600.000	16,13	490.353.701	14,74	548.467.129			31	1.038.820.830	53,61	41,36
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	1.424.400.000	25,00	118.061.000	17,85	207.057.970			43	325.118.970	42,85	22,82
		Rata-rata capaian kinerja (%)											49,32	29,98
		Predikat kinerja											SR	SR
DINAS SOSIAL				23.209.420.900		5.875.603.422		5.968.670.072				11.844.273.494		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.298.510.600	25,59	1.632.342.891	10	963.384.386			279	2.595.727.277	40,05	48,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.045.000.000		278.501.200	-	129.513.790			91	408.014.990	73,98	39,04
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				15.075.910.300		3.534.229.531	7.062	4.554.596.146			11.181	8.088.825.677	69,50	53,65

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
			I				II		III		IV				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				925.000.000		109.693.000	16	186.963.650			20.322	296.656.650	32,92	32,07	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				825.000.000	87	319.969.800	180	130.739.300			610	450.709.100	63,85	55,31	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				40.000.000		867.000	-	3.472.800			-	4.339.800	-	10,85	
		Rata-rata capaian kinerja (%)												46,72	39,99
		Predikat kinerja												SR	SR
DINAS TENAGA KERJA				7.821.709.200		1.470.593.870		1.984.654.924					3.505.382.394		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	75	BB	4.176.134.600	-	1.192.426.930	38	1.137.312.593					2.379.873.123	0	57
	Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja	85,10	Baik	1.411.697.400	-	182.589.790		268.577.355					451.167.145	0	32
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	100	%	77.600.000		5.000.000	20,0	9.608.250			20,00	14.608.250	20	19	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	19,70	%	1.507.900.000	14,3	30.627.450	34,6	489.581.676			48,92	520.209.126	248	34	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang bekerja	55	%	140.000.000	4,6	7.368.500	17,9	9.000.000			22,4	16.368.500	41	12	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan)	80,29	%	508.377.200	55,61	52.581.200	32	70.575.050			55,61	123.156.250	69	24	
		Rata-rata capaian kinerja (%)												63,063	24,37
		Predikat kinerja												R	SR
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN				30.133.388.150		7.242.930.828		8.287.683.722					15.530.614.550		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	14.667.962.900	100	4.670.621.032	100	3.866.116.255			100	8.536.737.287	100,00	58,20	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
					I		II		III		IV						
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	111	%		NA		NA						NA		-		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	126	%	1.046.082.235	NA	120.109.880	NA	508.789.735					NA	628.899.615	-	60,12	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	15	%	1.758.188.240	-	542.996.853	-	489.585.200					-	1.032.582.053	-	58,73	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100	%	15.000.000	100	-	100	4.370.000					100	4.370.000	100,00	29,13	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	10.100	Ton	1.877.218.150	2.594	150.376.558	2.455	857.835.850					2.594	1.008.212.408	25,68	53,71	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	23	Kg/Kap/Tahun	580.000.000	NA	77.719.650	NA	72.445.730					NA	150.165.380	-	25,89	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	81.000	Ton	1.988.236.625	10.782	391.805.124	37.068	237.127.035					10.782	628.932.159	13,31	31,63	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak	1	%	4.243.000.000	NA	1.065.101.000	NA	1.109.567.150					NA	2.174.668.150	-	51,25	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	63	Kw/Ha	610.000.000	NA	-	NA	8.847.750					NA	8.847.750	-	1,45	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Angka Produksi Hasil peternakan	10.400	Ton	280.000.000	NA	53.442.076	NA	92.558.967					NA	146.001.043	-	52,14	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100	%	1.949.000.000	100	147.944.055	100	648.123.650					100	796.067.705	100,00	40,84	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
			I				II		III		IV				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.848.407.900		2.327.530.144		2.601.095.276					4.928.625.420	23,91	23,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemuatan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	8.813.407.900	25	2.171.701.094		2.272.692.319				25	4.444.393.413	49,65	39,91
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	%	480.000.000	7	45.843.100	29	152.923.305				37	198.766.405		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil	99	%	265.000.000	7	42.189.450	-	71.271.184				23	113.460.634	50,62	36,39
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	260.000.000	-	60.509.100	1	87.808.468				1	148.317.568	50,00	78,96
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	%	30.000.000	33	7.287.400		16.400.000				33	23.687.400	66,67	78,96
	Rata-rata capaian kinerja (%)												53,75	48,26	
	Predikat kinerja												R	SR	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.519.531.100	-	1.473.958.955		3.571.962.814				-	5.045.921.769	23,12	9,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.686.642.100		1.070.070.355		1.119.077.284					2.189.147.639	56,27	46,71
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				294.200.000		6.750.000	-	17.963.400					24.713.400	45,00	8,40
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				5.115.049.000		340.091.600	-	939.522.850				326	1.279.614.450	51,42	25,02
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.046.800.000		39.217.000		1.208.871.280				100	1.248.088.280	50,00	30,84

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
				I		II		III		IV						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			55.000.000	-	-	-	9.750.000					-	9.750.000	50,00	17,73	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			221.840.000		-	-	42.099.000						42.099.000	50,00	18,98	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			850.000.000		-	-	200.570.000						200.570.000	45,00	23,60	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			120.000.000		17.830.000	-	34.109.000						51.939.000	52,50	43,28	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		50	130.000.000		-	-	-						-	50,00	-	
	Rata-rata capaian kinerja (%)														50,02	32,51
	Predikat kinerja														R	SR
DINAS PERHUBUNGAN			39.064.769.100		12.082.667.640		11.385.050.777						23.503.571.522			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	79,50 (B)	25.483.378.000		7.887.427.237		7.986.334.102					-	15.873.761.339	-	62,29
	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	82,65 / A	9.792.009.100		3.415.900.946	0	2.245.172.334					-	5.661.073.280	-	57,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	INDEKS KELANCARAN LALU LINTAS	VCR	0,36	3.198.280.000	51,96	745.376.352	0	1.153.544.341					-	1.898.920.693	0	59,37
	RASIO KONEKTIVITAS KAB / KOTA	Nilai	0,64	591.102.000	60	33.963.105	0	-					-	69.816.210	-	-
															31,28	30,49
															SR	SR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			17.706.321.300,00		2.890.333.051,00		4.597.250.249,00						7.487.583.300,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (81 Point)	81	%	6.237.121.300,00	-	1.749.092.177,00	82,01	1.453.542.285,00					82,01	3.202.634.462	101,25	51,35
	Nilai IKM Diskominf (87 Point)	100	%		28,37		23,98612472						52,35	-		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	92	%	1.754.200.000,00	53,63	352.323.893,00	0,250226655	433.509.445,00						53,88	785.833.338	58,57	44,80
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE (100%)	100	%	9.217.000.000,00	39,07	707.090.599	0	2.581.082.079,00						39,07	3.288.172.678	75,00	35,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	20	%	252.982.000,00		43.729.032	10	45.280.540,00						10,00	89.009.572	40,00	35,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	400	Poin	245.018.000,00	-	38.097.350	0	83.835.900,00						-	121.933.250	66,67	49,77
	Rata-rata capaian kinerja (%)															62,67	39,23
	Predikat kinerja															R	SR
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				18.519.364.800		3.194.785.604		4.426.198.937							7.620.984.541		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	85	Kategori/ point	2.988.333.600	-	472.507.265		687.534.162						-	1.160.041.427	0,00	38,82
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Kategori/ point	8.070.384.800		2.244.631.648		2.152.243.091						-	4.396.874.739	0,00	54,48
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi	8,53	%	205.535.000		5.200.000		37.045.500						-	42.245.500	0,00	20,55
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2,5	%	343.800.000		14.800.000		20.350.000						-	35.150.000	0,00	10,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Modal Usaha Mikro	0,03	%	105.000.000	-		-							-	0	0,00	0,00
	Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat	5,56	%	530.535.000		67.065.100		56.113.880						-	123.178.980	0,00	23,22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
				I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	IKM Pelayanan Pasar	85	Kategori	4.075.776.400		279.495.390		1.166.158.310				-	1.445.653.700	0,00	35,47
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	Nilai Ekspor non migas	31	US\$ (Juta)	575.000.000		82.151.201		81.449.327					163.600.528	31,88	28,45
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	100	%	200.000.000		23.801.000		26.063.300				50,00	49.864.300	50,00	24,93
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Industri	6,67	%	1.425.000.000		5.134.000		199.241.367				-	204.375.367	0,00	14,34
	Rata-rata capaian kinerja (%)													29,30	25,92
	Predikat kinerja												SR	SR	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				7.995.267.700		1.794.563.495		1.418.763.465					3.213.326.960		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi DPMPTSP	100	Per센	7.428.420.700	33	1.751.366.495	47	1.380.623.665				80	3.131.990.160	67,13	42,16
Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	Per센	131.030.000	45	26.376.000	45	15.549.800				90	41.925.800	68,00	32,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	100	Per센	435.817.000	1,1	16.821.000	29,0	22.590.000				30,15	39.411.000	64,67	9,04
	Rata-rata capaian kinerja (%)													66,60	40,19
	Predikat kinerja												S	SR	
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				19.298.953.357		2.594.046.853		1.729.140.695					4.323.187.548		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	6.981.138.883	0	2.025.685.042						0	2.025.685.042	0,00%	29,02%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
				I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	30,77	%	1.841.002.850	15,39	43.127.850		562.994.200				15	606.122.050	50,00%	32,92%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	36,59	%	4.159.789.700	0	2.768.290						0	2.768.290	0,00%	0,07%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	68,63	%	350.000.000	22,65	99.008.000						23	99.008.000	33,00%	28,29%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	25	%	1.245.000.000	1,30	87.411.016	5	306.933.731				7	394.344.747	26,00%	31,67%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	61,22	%	102.835.000	0	-	0	13.500.000				0	13.500.000	0,00%	13,13%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	542.625	Orang	1.542.272.300	0	37.606.800		76.620.000				0	114.226.800	0,00%	7,41%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	56,67	%	957.012.500	0	-	16	164.473.229				16	164.473.229	28,13%	17,19%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	36,59	%	2.119.902.124	0	298.439.855	15	604.619.535				15	903.059.390	41,67%	42,60%
	Rata-rata capaian kinerja (%)													38,26	34,79
	Predikat kinerja													SR	SR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH				6.422.027.100		1.414.930.780		1.257.303.396					2.677.434.176		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Poin/ Nilai	5.573.545.300		1.323.437.430	80,15	1.226.918.496				80,15	2.550.355.926	98,95	45,76
	Nilai IKM Perangkat Daerah	84	Poin/ Nilai		83,97		83,99								
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Masyarakat	20736	Orang	449.350.800	4761	63.660.600	3088	15.124.000				7.849	83.984.600	37,85	18,69
	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	530	Orang		0	-						0		0,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
				I		II		III		IV							
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengelolaan Arsip	Nilai aspek kebijakan	19.50	Poin	399.131.000		27.832.750		15.260.900				0	43.093.650	0,00	10,80		
	Nilai aspek pembinaan	13.60	Poin									0		0,00			
	Nilai aspek pengelolaan arsip statis	11.00	Poin														
	Nilai aspek sumber daya kearsipan	13.00	Poin														
	Rata-rata capaian kinerja (%)													30,32	19,97		
	Predikat kinerja													SR	SR		
SEKRETARIAT DAERAH				82.467.266.992		11.965.704.941	-	36.671.727.633					48.637.432.574				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	48.774.012.476	25	10.571.929.257	25	24.401.861.609				50	34.973.790.866	2.735	2.674		
	Capaian IKM Perangkat Daerah	Baik	Kategori	339.735.972	-	16.564.000	-	71.590.837				-	88.154.837	-	52		
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori	840.947.328	-	53.379.250	-	231.211.937				-	284.591.187	100	114		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	100	%	28.010.442.550	-	965.936.400	25	10.478.869.380				50	11.444.805.780	369	169		
	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	100	%	247.503.850	-	8.357.000	25	48.136.300				50	56.493.300	75	23		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100	%	961.267.000	-	70.935.950	25	346.141.998				50	417.077.948	164	127		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	%	836.174.397	-	86.206.684	25	435.808.860				50	522.015.544	630	504		
	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	100	%	1.347.161.480	-	72.283.092	25	320.216.605				50	392.499.697	113	94		
	Indek Kematangan UKPBJ	5/9	Level %	1.110.021.939	-	120.113.308	-	337.890.107				-	458.003.415	135	130		
	Rata-rata capaian kinerja (%)													57,52	43,33		
	Predikat kinerja													R	SR		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
						I		II		III		IV						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
SEKRETARIAT DPRD			61.834.339.500		15.408.557.053		15.697.876.584							31.106.433.637				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	45.899.395.242	8.495	14.072.031.533	9.906	10.629.346.153						18.399	24.701.377.686	31,52	53,82	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	100	%	15.934.944.258	14	1.336.525.520	16	5.068.530.431						30	6.405.055.951	54,03	40,20	
	Rata-rata capaian kinerja (%)															42,78	33,13	
	Predikat kinerja															SR	SR	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			16.899.581.600		3.853.452.485		2.803.062.920							6.656.515.405				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/RPJMD	%	100	1.895.000.000	25	369.097.143	25	278.899.970						50	647.997.113	50,00	34,20	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	100	1.795.000.000	25	235.077.980	25	328.653.348						50	563.731.328	50,00	31,41	
	Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berpredikat minimal baik	%	80		-		-							-		0,00		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	%	90	605.000.000	-	9.787.710		6.138.300						-	15.926.010	0,00	2,63	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	10	495.000.000	-	21.443.780		90.496.986						-	111.940.766	0,00	22,61	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	12.109.581.600	25	3.218.045.872	25	2.098.874.316						50	5.316.920.188	50,00	43,91	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
				I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			12.980.517.000		2.882.519.375		2.830.235.719					5.712.755.094			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	10.089.558.200		2.665.498.482		2.450.859.683				5.116.358.165	59,91	50,71	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengadaan ASN			1.134.788.800		79.329.766		119.514.570				198.844.336	60,00	17,52	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian			217.740.000		3.935.000		72.539.700				76.474.700	61,16	35,12	
	Meningkatnya cakupan pemetaan kompetensi			491.540.000		13.936.584		59.678.350				73.614.934	65,29	14,98	
	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja dan penaganan disiplin			282.890.000		18.591.491		16.219.916				34.811.407	24,91	12,31	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	%	764.000.000		101.228.052		111.423.500				212.651.552	20,67	27,83	
	Rata-rata capaian kinerja (%)												44,47	32,52	
	Predikat kinerja														SR
INSPEKTORAT DAERAH		3.428		16.324.501.700		3.762.749.979		340.632.548				7.496.735.503			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3	Level	13.976.968.500	-	3.693.835.766						7.087.188.742		-	
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A (84,72)	Kategori Point		-		84,86					84,86		100,17	
	Nilai PM maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah	3,075	Point		-								-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
				I		II		III		IV							
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Nilai IKM Inspektorat Daerah	84,00 (Baik)	Kategori	-				-				-					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP yang diverifikasi	100	%	1.385.279.300	79,40	1.678.500		211.197.630				79	212.876.130	79,40	15,37		
	Level Kapabilitas APIP	3	Level	-				-				-			-		
	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai standar	100	%		-			-				-			-		
	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	100	%		-			-				-			-		
	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		-			80				80			80,00		
	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		-			70				70			70,00		
	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		-			94				94			93,75		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3	Level	962.253.900	-	67.235.713	-	129.434.918				-	196.670.631	-	20,44		
	level MRI	2	Indeks	-		-		-				-			-		
	capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	Level (3,075)		-							-			-		
	capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	Level (3,075)		-							-			-		
	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	67,00	%		-			100				100			149,25		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
			I				II		III		IV				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	100	%		-						-		-		
	persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	100	%		100,00						100		100,00		
	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	100	%		25,00		25				50		50,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)												42,78	45,92	
	Predikat kinerja												SR	SR	
KECAMATAN CIHIDEUNG				10.033.369.700		2.417.853.666	-	1.977.899.180					4.395.752.846		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Cihideung	81,50	kategori A	6.459.392.700	-	2.051.825.549	80,45	1.448.543.006				80,45	3.500.368.555	98,71	54,19
	Nilai IKM Kecamatan Cihideung	91,16	kategori	435.553.806		57.852.183	50,00	73.003.307				50,00	130.855.490	54,85	30,04
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	100,00	%	32.000.000	44,44	-	50,00	15.992.950				94,44	15.992.950	94,44	49,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, ekbang, pemerintahan dan tantribum	100	%	3.065.623.194	16,18	308.175.934	19,35	440.359.917				35,53	748.535.851	35,53	24,42
KELURAHAN YUDANEGERA		100	%	380.080.000	15,55	35.767.344	16,16	57.347.340				31,71	93.114.684	31,71	24,50
KELURAHAN ARGASARI		100	%	413.980.000	20,51	54.356.790	19,20	46.762.279				39,71	101.119.069	39,71	24,43
KELURAHAN CILEMBANG		100	%	467.380.000	13,14	52.522.432	9,33	23.327.270				22,47	75.849.702	22,47	16,23
KELURAHAN NAGARAWANGI		100	%	393.280.000	9,80	15.709.800	23,28	40.710.440				33,09	56.420.240	33,09	14,35
KELURAHAN TUGURAJA		100	%	464.680.000	15,07	69.806.868	21,07	97.541.578				36,14	167.348.446	36,14	36,01
KELURAHAN TUGUJAYA		100		407.080.000	14,19	55.462.700	11,39	66.306.650				25,58	121.769.350	25,58	29,91

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
				I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang ekbang	100	%	313.482.194	25	-	35	3.649.800				60,00	3.649.800	60,00	1,16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	100	%	225.661.000	16,15	24.550.000	41,23	104.714.560				57,38	129.264.560	57,38	57,28
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	%	40.800.000	37,50	-	12,50	-				50,00	-	50,00	-
	Rata-rata capaian kinerja (%)													54,03	23,69
	Predikat kinerja													R	SR
KECAMATAN CIPEDES				8.243.067.500		2.006.741.238		2.112.290.083					4.119.031.291		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100		5.486.277.000	16,79	1.796.375.331	26,27	1.292.849.034				43,06	3.089.224.365	43,06	56,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	100		626.500.000	-	-	50	310.689.800				50	310.689.800	50,00	49,59
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100		26.570.500	50	16.050.400	0	2.000.000				50	18.050.400	50,00	67,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100		47.000.000	-	4.000.000	50	30				50	4.000.000	50,00	8,51
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	100	2.056.720.000	0,67	190.315.507	0,17	506.751.219				57,08	697.066.726	57,08	33,89
	Rata-rata capaian kinerja (%)													50,03	43,25
	Predikat kinerja													R	SR
KECAMATAN TAWANG				9.209.712.800		2.301.867.113		2.605.875.255					4.917.035.468		
0.00.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	6.459.412.800	21,83	2.032.318.873	32,65	1.622.946.332				54,71	3.664.558.305	54,71	56,73

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II		III		IV			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	%	21.000.000	60	12.275.900	10	477.800			70	12.753.700	70,00	60,73
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	2.685.300.000	25,5	248.679.540	60,5	969.926.123			86	1.218.605.663	86,00	45,38
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAHAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	100	%	44.000.000	53	8.592.800	2	12.525.000			55	21.117.800	55,00	48,00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	%	0	0	0	0	0			0	0	-	-
	Rata-rata capaian kinerja (%)												66,43	52,71
	Predikat kinerja												S	R
KECAMATAN INDIHIANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (89,50)	Point	7.099.869.685		2.508.983.007	-	2.599.725.419			-	5.108.708.426		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89,50)	Point	323.975.115		-		14.480.000			-	14.480.000	33,33	4,47
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	100%		82.300.000	4	14.800.000	2	3.350.000			6	18.150.000	50,00	24,10
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAHAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Indihiang	3	Dokumen	45.000.000		4.000.000	1	2.624.000			1	6.624.000	-	14,72

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
				I		II		III		IV							
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Indihiang	100%	-									-	-	-	-	-	-
KELURAHAN INDIHIANG		90%	396.580.000	1	14.999.794	-	102.011.188					1	117.010.982	50,00	29,51		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	396.580.000	1	14.999.794		102.011.188					1	117.010.982	50,00	29,51		
KELURAHAN SIRNAGALIH		90%	378.280.000	4	29.757.725	20	128.374.100					57	158.131.825	50,00	41,80		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	378.280.000	4	29.757.725	20	128.374.100					57	158.131.825	50,00	41,80		
KELURAHAN PARAKANNYASAG		90%	441.580.000	1	19.656.020	-	151.468.544					1	171.124.564	75,00	38,75		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	441.580.000	1	19.656.020		151.468.544					1	171.124.564	75,00	38,75		
KELURAHAN PANYINGKIRAN		90%	400.380.000	8	14.969.972	-	51.210.375					8	66.180.347	17,65	16,53		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	400.380.000	8	14.969.972		51.210.375					8	66.180.347	17,65	16,53		
KELURAHAN SUKAMAJUKALER		90%	443.380.000	-	-	-	184.383.740					-	184.383.740	75,00	41,59		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	443.380.000		-		184.383.740					-	184.383.740	75,00	41,59		
KELURAHAN SUKAMAJUKIDUL			415.180.000	1	39.348.460		144.338.680					1	183.687.140	60,00	44,24		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%	415.180.000	1	39.348.460		144.338.680					1	183.687.140	60,00	44,24		
	Rata-rata capaian kinerja (%)													54,05	32,77		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II		III		IV			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Predikat kinerja													R	SR
KECAMATAN KAWALU														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	1.334		9.657.642.800	326	2.709.025.291	331	2.822.282.914			657	5.531.308.205	42,82	57,27
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Kategori Masyarakat (IKM)	181		1.083.840.300	53	179.030.766	49	172.265.531			102	351.296.297	56	32,41
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12		20.000.000			6	3.410.000			12	3.410.000	100	17,05
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kawalu	12		8.000.000	0	-	6	-			6	-	50,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	39		52.500.000	-	-	6	-			6	-	15.38461538	-
KELURAHAN CILAMAJANG				388.180.000		29.644.677		157.298.133					186.942.810	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	684		388.180.000	163	29.644.677	172	157.298.133			335	186.942.810	69,66	48,16
KELURAHAN GUNUNG TANDALA				447.280.000		35.814.180		185.339.783						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1042		447.280.000	253	35.814.180	304	185.339.783			557	221.153.963	67,52	49,44
KELURAHAN URUG				406.480.000		25.062.920								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	802		406.480.000	190	25.062.920	241	155.403.528			431	180.466.448	67,59	44,40
KELURAHAN TANJUNG				371.080.000		15.331.800		131.457.900						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	574		371.080.000	45	15.331.800	346	131.457.900			391	146.789.700	54,70	39,56

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
				I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
KELURAHAN CIBEUTI			401.080.000		30.150.000		156.920.125								
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	768	401.080.000	184	30.150.000	237	156.920.125					421	187.070.125	71,17	46,64
KELURAHAN KARANGANYAR			402.580.000		17.302.025		150.393.000						167.695.025		
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	780	402.580.000	65	17.302.025	362	150.393.000					427	167.695.025	71,15	41,66
KELURAHAN TALAGASARI			352.480.000		27.787.500		163.599.524								
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	455	352.480.000	37	27.787.500	291	163.599.524					328	191.387.024	74,40	54,30
KELURAHAN LEUWILANG			361.480.000		14.423.740		165.294.585								
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	340	361.480.000	43	14.423.740	161	165.294.585					204	179.718.325	60,00	49,72
KELURAHAN GUNUNG GEDE			408.880.000		35.730.000		162.282.847						198.012.847		
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	814	408.880.000	132	35.730.000	412	162.282.847					544	198.012.847	62,63	48,43
KELURAHAN KARSAMENAK			512.380.000		48.003.280		102.927.443						150.930.723		
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1486	512.380.000	242	48.003.280	405	102.927.443					647	150.930.723	48,38	29,46
	Rata-rata capaian kinerja (%)													60,78	51,74
	Predikat kinerja													R	R
KECAMATAN CIBEREUREUM			13.611.302.700,00		3.312.670.390,00		3.460.392.117,00						6.773.062.507,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	100,00	%	9.504.092.400,00	24	3.099.940.621,00	24	2.420.742.604,00				47,74	5.520.683.225,00	58,95	58,09
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	%	27.000.000,00	-	-	1	9.550.000,00				1,00	9.550.000,00	50,00	35,37

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
						I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	%	4.009.677.350	75,00	212.729.769	75,00	1.026.195.513					44,72	1.238.925.282	46,22	30,90	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Presentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Keterbitan Umum	100	%	42.000.000	-	-	1	3.904.000					1	3.904.000	14,29	9,30	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Keterbitan Umum	1	Kegiatan	28.532.950	1	-							1	-	64,95	-	
	Rata-rata capaian kinerja (%)														45,75	21,47	
	Predikat kinerja														SR	SR	
KECAMATAN TAMANSARI				11.342.518.500,00		2.729.904.188,00		3.183.418.081,00						5.913.322.269,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah			7.878.301.750,00		2.523.831.741,00		2.169.084.539,00						4.692.916.280,00	73,64	59,57	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	20		80.500.000,00	1	-	1	19.099.850,00					2	19.099.850,00	10	23,73	
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6		111.776.750,00	1	17.272.000,00	2	7.430.000,00					3,00	24.702.000,00	50,00	22,10	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERBITAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Laporan	42.000.000	1	0	1	7.936.100,00					2	7.936.100,00	66,67	18,90	
KELURAHAN TAMANSARI				386.080.000		17.652.985		103.520.086						121.173.071			
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4		386.080.000	1	17.652.985	2	103.520.086					3	121.173.071	75	31	
KELURAHAN MUGARSARI				359.980.000	1	13.011.290		163.498.483						176.509.773			
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4		359.980.000	1	13.011.290	2	163.498.483					3	176.509.773	75	49	
KELURAHAN TAMANJAYA				411.880.000		34.071.828		170.970.995						205.042.823			
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4		411.880.000	1	34.071.828	2	170.970.995					3	205.042.823	75	50	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
				I		II		III		IV						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
KELURAHAN SUMELAP			369.580.000		23.503.000		125.875.300						149.378.300			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4	369.580.000	1	23.503.000	2	125.875.300					3	149.378.300	75	40	
KELURAHAN SETIAWARGI			458.980.000		20.874.030		98.029.820						118.903.850			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4	458.980.000	1	20.874.030	2	98.029.820					3	118.903.850	75	26	
KELURAHAN MULYASARI			454.480.000	1	31.416.640		103.771.210						135.187.850			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4	454.480.000	1	31.416.640	2	103.771.210					3	135.187.850	75	30	
KELURAHAN SUCAHURIP			389.680.000		23.363.820		151.756.320						175.120.140			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4	389.680.000	1	23.363.820	2	151.756.320					3	175.120.140	75	45	
KELURAHAN SETIAMULYA			399.280.000	1	24.906.854		62.445.378						87.352.232			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4	399.280.000	1	24.906.854	2	62.445.378					3	87.352.232	75	22	
	Rata-rata capaian kinerja (%)													64,72	42,85	
	Predikat kinerja													R	SR	
KECAMATAN MANGKUBUMI			11.793.351.300		2.492.944.372		2.712.842.348						5.205.786.720			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	7.903.011.300	42,25	2.226.498.329	77,05	2.114.230.065					119,30	4.340.728.394	52,02	54,92
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	36.500.000	0,50	-	1,50	15.811.200					2,00	15.811.200	66,67	43,32
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	402.600.000	5,00	24.849.380	26,00	100.102.000					31,00	124.951.380	45,51	31,04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II		III		IV			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Mangkubumi	100	%	69.500.000	1,00	5.505.000	1,00	3.425.000			2,00	8.930.000	50,00	12,85
Kelurahan Mangkubumi				469.180.000	9,00	37.500.000	4,00	71.985.775			13,00	109.485.775	45,83	23,34
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	469.180.000	9,00	37.500.000	4,00	71.985.775			13,00	109.485.775	45,83	23,34
Kelurahan Cigantang				404.380.000	9,00	26.699.408	7,00	89.568.496			16,00	116.267.904	58,33	28,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	404.380.000	9,00	26.699.408	7,00	89.568.496			16,00	116.267.904	58,33	28,75
Kelurahan Karikil				398.980.000	9,00	25.799.740	4,00	40.555.560			13,00	66.355.300	50,83	16,63
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	398.980.000	9,00	25.799.740	4,00	40.555.560			13,00	66.355.300	50,83	16,63
Kelurahan Linggajaya				485.380.000	9,00	40.125.000	4,00	68.877.700			13,00	109.002.700	50,00	22,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	485.380.000	9,00	40.125.000	4,00	68.877.700			13,00	109.002.700	50,00	22,46
Kelurahan Cipawitra				377.680.000	9,00	22.249.950	5,25	33.059.590			14,25	55.309.540	51,34	14,64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	377.680.000	9,00	22.249.950	5,25	33.059.590			14,25	55.309.540	51,34	14,64
Kelurahan Sambongpari				378.580.000	9,00	22.399.790	5,10	35.832.284			14,10	58.232.074	55,00	15,38
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	378.580.000	9,00	22.399.790	5,10	35.832.284			14,10	58.232.074	55,00	15,38
Kelurahan Sambongjaya				453.880.000	9,00	32.770.335	4,50	46.805.418			13,50	79.575.753	50,00	17,53
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	453.880.000	9,00	32.770.335	4,50	46.805.418			13,50	79.575.753	50,00	17,53
Kelurahan Cipari				413.680.000	9,00	28.547.440	5,15	92.589.260			14,15	121.136.700	54,38	29,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	413.680.000	9,00	28.547.440	5,15	92.589.260			14,15	121.136.700	54,38	29,28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
			I				II		III		IV			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Rata-rata capaian kinerja (%)												52,49	25,14
	Predikat kinerja												R	SR
KECAMATAN BUNGURSARI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Bungursari	100		7.601.947.400	17,92	2.753.906.695	20,68	1.870.598.085			38,59	4.624.504.780	38,59	60,83
	Nilai IKM Kecamatan Bungursari													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	100		29.750.000	50,00	-	10,00	11.899.350			60,00	11.899.350	60,00	40,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100		46.000.000	25,00	-	25,00	3.580.000			50,00	3.580.000	50,00	7,78
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	100		3.156.335.000	35,56	118.334.177	16,39	699.375.551			51,94	817.709.728	51,94	25,91
	Rata-rata capaian kinerja (%)												49,53	36,20
	Predikat kinerja												SR	SR
KECAMATAN PURBARATU														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	6.713.279.600	28,81	2.129.301.917	57,74	1.578.784.714			52,79	3.708.086.631	52,79	55,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan pelayanan Publik	100	%	31.980.000	15,00	-	55,00	9.370.000			55	9.370.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	9.500.000	25,00	1.500.000	50,00	875.000			50,00	2.375.000	50,00	25,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	%	43.003.000	35,00	3.100.000	40,00	-			40,00	3.100.000	40,00	7,21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)		
						I		II		III		IV						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	%	2.664.490.300	29,75	214.770.950	58,63	567.880.182					58,63	782.651.132	58,63	29,37		
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,353	29,204	
Predikat kinerja																R	SR	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				58.403.153.730		1.781.903.049		38.139.751.762						39.921.654.811				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP perangkat daerah	BB	kategori	3.225.658.200		697.209.479	31	782.010.807					31,00	1.479.220.286	360,33	173,73		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase capain Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			6.003.999.000	500	509.960.590	615	1.631.985.550						2.141.946.140			36	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang dibina			5.487.814.700		156.338.000	-	884.068.801					-	1.040.406.801			19	
PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina			3.753.584.180		222.585.880	515	329.379.010					515	551.964.890			15	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			3.330.000.000		1.274.500	-	-					-	1.274.500			0	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan konflik sosial			36.602.097.650		194.534.600	155	34.512.307.594					155	34.706.842.194			95	
Rata-rata capaian kinerja (%)																4,29	55,54	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)			
			I				II		III		IV				
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	SR	R
	Predikat kinerja														

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2024.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan uraian capaian program tersebut di atas, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain:

- 1) Kapasitas aparatur pelaksana kegiatan.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 3) Sarana dan prasarana penunjang.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada tahun 2024 ini adalah:

- 1) Beberapa pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- 2) Ketersediaan barang pada e-katalog yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Kurangnya pemahaman dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 4) Banyak SDM yang juga masih belum terampil dalam mengolah data dan menyusun laporan Evaluasi Hasil Renja dan RKPD lingkup Kab/Kota.
- 5) Tahapan dan proses pencairan dana sering mengalami keterlambatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam perubahan RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan keuangan daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tasikmalaya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2023, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Stabilitas perekonomian juga tetap terjaga, baik stabilitas eksternal maupun internal. Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik ditopang kinerja transaksi berjalan yang sehat di tengah tekanan terhadap neraca modal dan finansial seiring tingginya ketidakpastian global. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan meningkat dan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang tetap kuat serta ditopang oleh likuiditas yang memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah.

Kinerja perekonomian domestik yang positif ini dicapai di tengah gejolak perekonomian dunia yang meningkat dan penuh tantangan. Berbagai perkembangan menunjukkan 5 (lima) karakteristik mewarnai kinerja dan prospek ekonomi global 2023. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang melemah dan disertai divergensi. Kedua, penurunan inflasi lambat. Ketiga, suku bunga tinggi dalam waktu lama. Keempat, arus modal keluar dari negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs). Kelima, nilai tukar dolar AS tetap kuat. Perkembangan global ini memberikan tekanan terhadap ekonomi negara berkembang sehingga diperlukan penguatan respons kebijakan untuk

memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04 persen (year on year/yo), sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5 persen. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tumbuh 4,82 persen di 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga.

Outlook Perekonomian 2024

Berdasarkan tinjauan ekonomi, keuangan, & fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal, Perekonomian global menunjukkan tren membaik, tetapi masih dihadapkan pada tingginya risiko dan ketidakpastian. Tingkat inflasi global telah termoderasi, namun di banyak negara maju masih dalam tren yang tinggi sehingga menyebabkan berlanjutnya situasi *high for longer*. Aktivitas manufaktur global membaik dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufacture global berada di zona ekspansi. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas masih terjadi hingga pertengahan 2024 ini yang tidak hanya dipengaruhi permintaan dan penawaran, melainkan juga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi global menunjukkan tren beragam seperti perekonomian AS yang melanjutkan resiliensinya, ekonomi Eropa yang menunjukkan tanda pemulihan meskipun masih lemah, dan Tiongkok yang kembali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat meski dibayangi berbagai tantangan domestik. Sementara itu, negara-negara di Asia seperti India dan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Meskipun demikian, perekonomian global diproyeksi masih relatif lemah di 2024. Hal tersebut dipicu oleh kombinasi faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang masih tinggi, terbatasnya ruang kebijakan pemerintah, dan peningkatan tensi geopolitik. Termasuk pengaruh faktor struktural lain, seperti peningkatan fragmentasi geoekonomi, perkembangan demografi, serta dampak perubahan iklim.

Perekonomian Indonesia di triwulan I 2024 kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,1 persen (yo) ditopang permintaan domestik yang kuat dan dukungan kebijakan fiskal. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh kuat masing-masing sebesar 4,9 persen dan 24,3 persen (yo). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yo). Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yo). Ekspor riil masih tumbuh 0,5 persen (yo) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa, sementara impor riil tumbuh 1,8 persen (yo). Dari sisi kelompok produksi, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor akomodasi tumbuh signifikan. Tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan I 2024 mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional dan penurunan tingkat pengangguran berada dibawah periode sebelum pandemi Covid-19.

Laju inflasi terkendali, namun Pemerintah terus mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan. Di bulan Mei 2024, inflasi tercatat sebesar 2,84 persen (yo), atau dalam tren penurunan sejak bulan Maret lalu. Dilihat dari komponennya, kondisi inflasi yang stabil ditunjang oleh inflasi inti dan harga

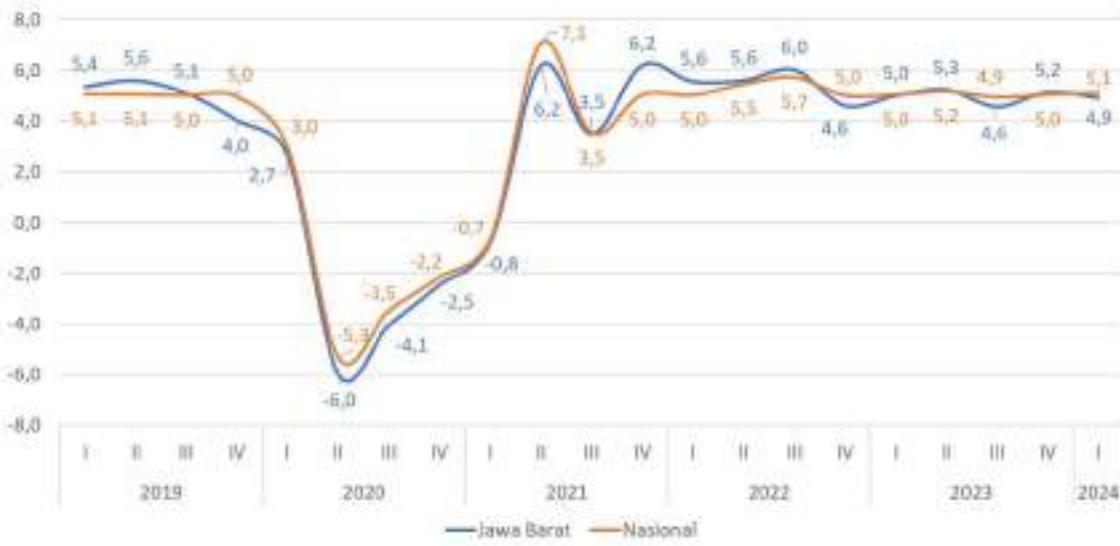
diatur pemerintah (*administered price*) yang relatif stabil, serta inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) yang menurun. Meskipun inflasi Mei tercatat rendah dan dalam tren menurun, Pemerintah terus mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan, terutama karena tantangan cuaca ekstrem. Berbagai kebijakan terus dilaksanakan, antara lain intervensi harga, stabilisasi pasokan, dan meningkatkan kelancaran distribusi, salah satunya guna mendukung pencapaian target inflasi *volatile food* 2024 di bawah 5 persen. Dalam jangka menengah, Pemerintah juga telah menetapkan PMK Nomor 31 tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi 2025-2027. Untuk periode tersebut, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Penetapan sasaran tersebut merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, perekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industri pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat memiliki tingkat dan arah pertumbuhan yang berada di sekitar tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan
Jawa Barat (y-o-y,%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Mei 2024, Diolah

Dinamika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di kisaran 5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara positif bertahan hingga triwulan I dan II tahun 2023, meskipun terdapat penurunan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan III (4,6 persen), capaian pertumbuhan di tingkat 5 persen kembali dicapai pada triwulan IV-2023, hal ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.

Keuangan Pemerintah

Kinerja fiskal yang tetap optimis pada triwulan I 2024 menjadi stimulus terjaganya ekonomi Jawa Barat dari dampak ketidakpastian ekonomi global, melalui akselerasi Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dengan mengoptimalkan kinerja Pendapatan.

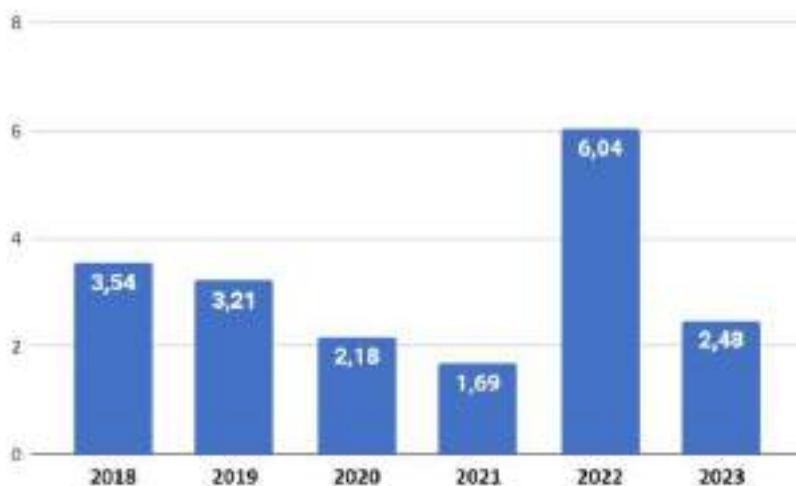
Pada triwulan I 2024, realisasi pendapatan APBN Jawa Barat, APBD Jawa Barat dan APBD 27 Kab/Kota mengalami kenaikan dengan realisasi masing-masing sebesar 21,77%, 23,32% dan 14,69% dari pagu anggaran. Sementara itu, realisasi belanja APBN Jawa Barat, APBD Jawa Barat dan APBD 27 Kab/Kota masing-masing sebesar 26,00%, 17,65% dan 11,17% dari pagu anggaran.

Kinerja positif keuangan daerah di Jawa Barat ditunjukkan oleh belanja yang tetap terjaga dengan mengoptimalkan pendapatan, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak di awal tahun 2024. Hal tersebut turut mengkonfirmasi momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tetap positif pada triwulan I 2024.

Perkembangan Inflasi

Selama tahun 2023, Jawa Barat mengalami perubahan dinamika inflasi yang mencerminkan ketahanan ekonominya. Pada Desember 2023, gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,96. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kota Bogor sebesar 3,36 persen dan terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,63 persen. Secara *month to month (m-to-m)* Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,37 persen. Inflasi *m-to-m* tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 0,54 persen. Sementara inflasi *m-to-m* terendah terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,19 persen.

Gambar 3.2.
Perkembangan Inflasi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (*y-to-d, %*)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Desember 2023, Diolah

Sepanjang 2023, banyak terjadi dinamika yang mempengaruhi inflasi secara signifikan, diantaranya adalah kenaikan harga cukai rokok rata-rata 10 persen yang akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan komoditas rokok menjadi salah satu penyumbang inflasi pada awal 2023. Kenaikan harga BBM Pertamax per 1 Maret 2023 juga mendorong laju inflasi di tengah masyarakat. Peak season saat hari besar keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha juga menjadi pendorong inflasi melalui kenaikan harga pada seluruh komoditas pangan, perhiasan, dan tiket bus. Tren inflasi juga diakibatkan oleh dinamika harga minyak dunia yang direspon oleh Pertamina melalui

penyesuaian harga LPG dan BBM Non Subsidi yang mengikuti tren harga minyak tersebut).

Stabilitas Keuangan Daerah & Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Meskipun dinamika risiko suku bunga global yang tinggi dalam jangka panjang (high for longer), stabilitas sistem keuangan Jawa Barat tetap relisien sebagaimana tercermin dari kondisi likuiditas yang memadai, risiko kredit yang rendah, dan permodalan yang kuat.

Dari sisi intermediasi perbankan, penyaluran kredit pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp 940,81 triliun atau tumbuh 11,61% (oy) dari sebesar Rp 912,93 triliun pada triwulan IV 2023. Perbankan telah mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset yang memperhatikan aspek safety, liquidity, dan profitability. Tingginya permintaan kredit dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh tingginya permodalan, berlanjutnya strategi realokasi aset ke kredit oleh perbankan, dan diterapkannya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Intermediasi perbankan yang mengalami peningkatan tersebut, didukung oleh pengelolaan risiko yang masih terkendali.

DPK Triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp 669,55 triliun, atau tumbuh 8,46% (oy) meningkat dibandingkan Triwulan IV 2023 4,39% (oy). Berdasarkan komponennya, pertumbuhan DPK terjadi pada seluruh komponen dana.

Guna mendukung pelaku UMKM, pemerintah terus memberikan stimulus untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan menguatkan bauran kebijakan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penguatan pembiayaan atau kredit. Kebijakan inklusi Bank Indonesia dari sisi penawaran dilakukan dengan memperkuat insentif pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5% dan insentif pencapaian RPIM tetap paking besar 0,5% serta perluasan cakupan subsektor pprioritas dari 38 subsektor menjadi 46 subsektor prioritas

Perkembangan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sejalan dengan pertumbuhan positif kondisi perekonomian Jawa Barat, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal. Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik didukung kondisi likuiditas yang memadai. Hal ini tercermin pada perbaikan kinerja transaksi pembayaran melalui RTGS, SKNBI, APMK UE, E-Commerce, dan QRIS pada triwulan I 2024.

Kondisi arus kas di Jawa Barat pada triwulan I 2024 menunjukan kondisi net-inflow sebesar Rp3,09 Triliun, setelah sebelumnya mengalami net-outflow sebesar Rp2,77 triliun. Kondisi terjadi seiring moderasi konsumsi pasca HBKN Nataru 2023. Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut tercermin dari tingginya jumlah merchant QRIS yang telah mencapai 6,84 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang tercatat sebesar 10,72 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 23,13% (oy) pada triwulan I 2024.

Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah dan industri akan terus memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan aspek pelindungan konsumen dalam inovasi produk melalui

kampanye literasi digital, termasuk melalui QRIS Jelajah Indonesia dan perluasan QRIS antarnegara.

Perkembangan Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan indikator untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan mencari pekerjaan, terlihat menurun dari Agustus 2021 ke Agustus 2023. Pada Agustus 2023, TPT di Jawa Barat tercatat sebesar 7,44 persen, menurun 0,87 persen poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Jawa Barat mungkin mengalami perbaikan, dengan lebih banyak pekerja yang menemukan pekerjaan atau adanya penciptaan lapangan kerja baru.

Gambar 3.3

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021 - Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Desember 2023, Diolah

Analisis berdasarkan gender menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan, yaitu sebesar 8,09 persen dibandingkan dengan 6,25 persen. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menghadapi pengangguran dibandingkan perempuan. Dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,46 persen, sementara TPT perempuan turun lebih signifikan, sebesar 1,64 persen.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Pada Agustus 2023, TPT di perkotaan adalah 7,92 persen, sementara di pedesaan adalah 5,65 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPT di perkotaan turun 1,00 poin, sementara di pedesaan turun 0,52 poin. Ini menunjukkan bahwa pengangguran terkonsentrasi lebih tinggi di daerah perkotaan, yang mungkin disebabkan oleh konsentrasi industri yang lebih tinggi, yang mengalami fluktuasi ekonomi lebih besar.

Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi terlihat pada kelompok dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mungkin mencerminkan kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan dan kebutuhan pasar kerja. Ini juga bisa menunjukkan bahwa lulusan SMK mungkin memiliki ekspektasi kerja yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang tersedia.

Prakiraan Perekonomian Ke Depan

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategorikan memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan meneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industry manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki perekonomian yang cukup berkembang. Sebagai pusat perekonomian di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya memiliki potensi dan tantangan ekonomi yang dinamis. Secara total, PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku dari tahun 2019 hingga 2023 hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,74 persen, yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Tasikmalaya. Tahun 2020 ke 2021 naik 5,81 persen, tahun 2021 ke 2022 naik 9,33 persen dan tahun 2022 ke 2023 naik 9,76 persen. Saat ini perekonomian Kota Tasikmalaya sudah mulai bisa beradaptasi dan bangkit dalam menghadapi pandemi Covid-19. Peningkatan/penurunan PDRB ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan/penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan/penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau pengeluaran.

Sektor Perdagangan selama 5 tahun terakhir menjadi penyumbang tertinggi PDRB di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mencapai 5,93 triliun rupiah atau sekitar 21,63 persen. Namun demikian peranannya cenderung menurun. Pada tahun 2019 peranan Sektor Perdagangan sebesar 22,73 persen, tahun 2020 sebesar 21,86 persen, tahun 2021 dan 2022 sebesar 21,69, tahun 2023 sebesar 21,63. Karena perekonomian Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung pada sektor ini, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang terjadi di sektor tersebut.

Sektor Pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Kota Tasikmalaya, Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tasikmalaya. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 mencapai 1,32 triliun rupiah atau sebesar 4,81 persen. Namun demikian kontribusi terhadap perekonomian, setiap tahunnya relatif mengalami penurunan. Selain penerapan teknologi sektor pertanian yang masih rendah karena petani rata-rata berusia tua dan kurangnya regenerasi petani, hal ini terjadi kemungkinan karena adanya alih fungsi lahan pertanian. Di lain pihak sektor Pertanian sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Pada tahun 2023, terjadi penurunan produksi pertanian karena terjadinya cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Peranan sektor Industri Pengolahan selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2019 peranannya terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya sebesar 14,10 persen, terus menurun hingga pada tahun 2023 menjadi 13,39 persen. Meskipun demikian, peranan sektor industri pengolahan masih berada di urutan ketiga terbesar penyumbang PDRB Kota Tasikmalaya. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha dalam desain, pengemasan dan penerapan digitalisasi ekonomi masih menjadi tantangan di sektor ini. Di lain pihak para pelaku usaha juga masih mengeluhkan kurangnya permodalan dan pemasaran produknya.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Peranan sektor ini terhadap perekonomian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan, lajunya sebesar 9,88 persen, dimana pada tahun-tahun sebelumnya relatif stabil di kisaran 10 persen. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 1,97 persen akibat pandemi COVID-19, dan pada tahun 2022 sektor ini juga mengalami kontraksi (-0,85 persen) karena nilai pinjaman keuangan pada tahun 2022 negatif dibandingkan tahun 2021.

Perekonomian di Kota Tasikmalaya selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif, pada tahun 2022 perekonomian tumbuh di angka 5,01 persen dan pada tahun 2023 menjadi 5,96 persen. Berikut capaian indikator makro tahun 2022-2023.

Tabel 3.1.
Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2022 - 2023

Indikator Pembangunan	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	73,83	74,47
Angka Kemiskinan (%)	12,72	11,53
Penduduk Miskin (ribu orang)	87,13	79,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,62	6,55
Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	22.964	24.234
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,96
Inflasi (%)	6,65	2,84
PDRB per Kapita ADH Berlaku (Juta Rupiah)	34,10	36,95
PDRB per Kapita ADH Konstan (Juta Rupiah)	22,91	23,97
PDRB ADH Berlaku (Triliun)	24,97	27,41
Indeks Gini (indeks)	0,405	0,428

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2024.

Disamping kondisi tersebut diatas, keadaan yang tidak menguntungkan diharapkan menjadi pendorong kekuatan dalam pembangunan perekonomian Kota Tasikmalaya, demikian pula dengan kendala dan tantangan yang tentunya harus diminimalisir oleh pemerintah daerah, salah satunya seperti terbatasnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas, daya beli yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan faktor lainnya.

3.1.2.Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

RKP Tahun 2024 bertema “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan*”.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan yang terdiri dari:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) penguatan daya saing

- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
- 8) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN).

Tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RKP Tahun 2024 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0 - 5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Nilai Tukar Nelayan	107-110
Rasio Gini (indeks)	0,374 – 0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 – 74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,27 %
Nilai Tukar Petani	105-108

Sumber: RKP Tahun 2024.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan pondasi ekonomi pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Arah kebijakan ekonomi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus kebijakan makro tahun 2024 terdiri dari percepatan transformasi ekonomi, pembangunan inklusif, pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan stabilitas ekonomi.
- 2) Mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pada target 5,3-5,7 persen.
- 3) Stabilitas eksternal yaitu dengan menjaga kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang di topang dengan dukungan kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor.
- 4) Arah kebijakan fiskal melalui fostur makro fiskal yang diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, *major*

project dan janji presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan pemilihan presiden RI (pelaksanaan tahun politik).

- 5) Stabilitas moneter melalui kebijakan pengendalian inflasi yang diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50 – 3,50 persen (yoY).
- 6) Stabilitas sistem keuangan difokuskan pada upaya percepatan pendalamannya sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- 7) Pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dengan indikator tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,0-5,7 persen, tingkat kemiskinan dikisaran 6,5-7,5 persen, rasio gini pada kisaran 0,374-0,377 poin, indeks pembangunan manusia ditargetkan 73,99 – 74,02 poin, ekonomi hijau dan rendah karbon melalui penurunan emisi GRK sebesar 27,27 persen, NPT pada kisaran 105-108, NTN pada kisaran 107-110 serta pemerataan pembangunan terutama wilayah kawasan timur Indonesia.

Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan;
- 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah;
- 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan
- 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Strategi nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara; dan
- 2) strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan rawan bencana.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah;
- 2) mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
- 3) meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Prioritas pengembangan wilayah nasional Tahun 2024 adalah investasi, industri pengolahan dan pariwisata. Arah kebijakan investasi yaitu: percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastruktur; penyiapan peta potensi investasi daerah; fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri; penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko; dan deregulasi serta integrasi perijinan investasi. Arah kebijakan industri manufaktur yaitu: re-skilling dan up-skilling industri pengolahan; pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal; substitusi impor dan TKDN; peningkatan ekspor hasil industri; percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK; serta inovasi dan adaptasi teknologi. Arah kebijakan industri pariwisata yaitu: reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara; reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal; penerapan standar kebersihan dan keselamatan; serta re-skilling dan up-skilling pariwisata.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulannya. Untuk wilayah Jawa-Bali fokus pengembangannya adalah:

- 1) industrialisasi berbasis pasar, memproduksi barang konsumsi, dan memanfaatkan keunggulan aglomerasi;
- 2) simpul pengolahan dalam rantai nilai domestik antar wilayah;
- 3) berpartisipasi dalam Global Value Chains;
- 4) pusat jasa modern nasional;
- 5) pintu gerbang internasional pariwisata nasional; dan
- 6) lumbung pangan nasional.

3.1.3.Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, hasil identifikasi permasalahan di tingkat regional dan nasional serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang tertera pada RPD Tahun 2024-2026, maka tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah “*Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*”. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19.

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan:
 - a.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
 - b.Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
 - c.Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
 - d.Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
 - e.Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 - f.Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g.Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
 - i. Peningkatan perhutanan sosial.
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a.Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
 - b.Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
 - c.Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.

3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan:
 - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
 - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
 - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
 - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
 - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
 - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
 - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
 - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
 - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
 - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
 - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
 - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
 - h. pembentukan wirausaha baru;
 - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
 - b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional, maka sasaran dan target pembangunan ekonomi makro daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Target Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2023-2024

Indikator Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2024	Rencana Perubahan Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,96	5,69	5,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,55	5,77	6,50
Tingkat Kemiskinan (%)	11,53	11,33	11,33
Rasio Gini (indeks)	0,428	0,380	0,400
Inflasi (%)	2,84	3,11	2,65
PDRB ADH Berlaku (Triliun)	27,41	25,21	28,93

Indikator Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2024	Rencana Perubahan Target 2024
PDRB per Kapita Adh Berlaku (Juta Rupiah)	36,95	34,35	37,63
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	75,47	74,28	75,65

Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2024 sebagaimana dengan prioritas Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka disusun strategi dan arah kebijakan perekonomian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian inflasi daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan ketersediaan pasokan bahan pokok;
 - b. Peningkatan kemandirian pangan masyarakat;
 - c. Peningkatan pengawasan kebutuhan bahan pokok.
2. Peningkatan iklim usaha dan inventasi yang berdaya saing, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan;
 - b. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.
3. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dunia kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja;
 - b. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja.
4. Peningkatan dan pengembangan UMKM, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil.
5. Peningkatan dan pengembangan pertanian dan perikanan dengan arah kebijakan Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai;
6. Peningkatan dan pengembangan pariwisata dengan arah kebijakan Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan dan pengembangan perdagangan dengan arah kebijakan Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
8. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan produktivitas industri mikro, kecil dan menengah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan balanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2024		
				Murni 2024	Realisasi Semester I 2024	Proyeksi Perubahan 2024
4.	PENDAPATAN	1.902.443. 766.698,35	1.698.775.855.442,64	1.647.360.624.110,00	758.642.437.702,10	1.770.088.872.369,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	341.362.213.700,35	364.301.975.457,64	353.665.538.400,00	145.383.678.500,10	353.665.538.400,00
4.1.01	Pajak Daerah	159.043.569.254,00	165.183.534.730,00	159.708.275.900,00	76.171.232.425,00	159.708.275.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.877.941.377,00	12.333.653.274,00	184.297.262.500,00	57.644.426.528,10	184.297.262.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.867.125.110,00	7.338.000.075,00	7.300.000.000,00	6.798.537.734,00	7.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	163.573.577.959,35	179.446.787.378,64	2.360.000.000,00	4.769.481.813,00	2.360.000.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.475.175.680.746,00	1.334.473.879.985,00	1.293.695.085.710,00	613.258.759.202,00	1.416.423.333.969,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.063.555.008.009,00	1.122.149.154.645,00	1.152.196.136.000,00	557.213.168.608,00	1.152.196.136.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.036.787.557.009,00	1.122.149.154.645,00	1.152.196.136.000,00	557.213.168.608,00	1.152.196.136.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	26.767.451.000,00				
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	411.620.672.737,00	212.324.725.340,00	141.498.949.710,00	56.045.590.594,00	264.227.197.969,00
4.2.02.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	134.992.856.376,00	137.139.050.331,00	141.498.949.710,00	56.045.590.594,00	141.498.949.710,00
4.2.02.02	<i>Bantuan Keuangan</i>	276.627.816.361,00	75.185.675.009,00			122.728.248.259,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.905.872.252,00	70.077.955.000,00			
4.3.01.	Pendapatan Hibah		70.077.955.000,00			
4.3.02	Dana darurat					
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	85.905.872.252,00				

Sumber: APBD Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan Semester I 2024

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2024		
				Murni 2024	Realisasi Semester I 2024	Proyeksi Perubahan 2024
5	BELANJA DAERAH	1.912.385.803.148,68	1.716.186.584.365,88	1.683.628.860.908,00	666.802.959.245,04	1.806.357.109.167,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.530.875.397.474,68	1.574.042.659.011,88	1.558.854.523.154,00	656.669.242.257,04	1.625.256.957.960,00
5.1.01	Belanja Pegawai	789.777.565.972,00	778.692.539.495,00	802.144.995.100,00	407.083.914.860,00	801.122.514.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.183.496.775,00	702.956.600.470,00	653.368.526.904,00	206.015.813.247,04	720.861.642.710,00
5.1.03	Belanja Bunga	20.996.181,68	113.122.048,88	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	142.670.000,00	512.325.000,00	450.000.000,00	75.000.000,00	450.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	92.053.368.546,00	88.968.071.998,00	101.166.001.150,00	43.494.514.150,00	101.097.801.150,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	697.300.000,00	2.800.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	1.525.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	378.644.240.783,00	137.927.625.828,00	93.590.090.487,00	9.123.736.104,00	170.650.527.189,00
5.2.01	Belanja Tanah	5.317.869.890,00	1.621.454.876,00	3.820.000.000,00	59.843.985,00	3.820.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.898.409.970,00	65.575.727.583,00	42.135.582.559,00	5.916.869.187,00	80.339.964.024,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.533.882.034,00	39.755.190.641,00	37.388.608.848,00	1.603.440.905,00	38.527.504.503,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.606.475.689,00	30.174.056.628,00	9.590.555.480,00	1.521.148.627,00	47.307.715.062,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.287.603.200,00	801.196.100,00	597.182.000,00	8.693.400,00	597.182.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			58.161.600,00	13.740.000,00	58.161.600,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.866.164.891,00	4.216.299.526,00	31.184.247.267,00	1.009.980.884,00	10.449.624.018,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.866.164.891,00	4.216.299.526,00	31.184.247.267,00	1.009.980.884,00	10.449.624.018,00

Sumber: APBD Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan Semester I 2024

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2024		
				Murni 2024	Realisasi Semester I 2024	Proyeksi Perubahan 2024
	SURPLUS/DEFISIT	(9.942.036.450,33)	(17.410.728.923,24)	(36.268.236.798,00)	91.839.478.457,06	(36.268.236.798,00)
			(1,02)	(2,20)	12,11	(2,05)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	32.472.811.509,40	29.753.908.942,07	36.268.236.798,00	14.181.372.338,09	13.666.691.614,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.034.818.129,40	48.729.670.617,07	46.268.236.798,00	14.181.372.338,09	23.666.691.614,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.967.311.129,40	22.502.803.290,07	34.945.012.898,00	12.343.467.714,09	12.343.467.714,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		18.676.776.100,00	1.323.223.900,00	1.837.904.624,00	1.323.223.900,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.500.000,00	74.329.552,00			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.562.006.620,00	18.975.761.675,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.499.999.620,00	1.500.000.000,00		0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	22.530.775.059,07	12.343.180.018,83	0,00	106.020.850.795,16	-22.601.545.184,00

Sumber: APBD Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan Semester I 2024

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya:

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
 - b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
 - c. Adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
 - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
 - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
 - d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
 - e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota
3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS.

B. Belanja Daerah

1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahannya;
3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Pemenuhan belanja yang bersumber dari DAU ditentukan;
7. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
8. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan
2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaianya, antara lain: Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;

- 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
- 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui:

1. Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan;
6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*);

7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
9. Alokasi Belanja untuk pemilukada
10. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

3.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.

3.2.4.Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1. Dana Belanja DIPA Kementerian/Lembaga (Tugas Pembantuan dan Satker) di Daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang program Pembangunan di Daerah, yaitu dengan memanfaatkan dana DIPA Kementerian/Lembaga, berupa dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Satker melalui Kementerian/Lembaga yang ada di daerah.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Prinsip Pengelolaan Dana TP antara lain (1) Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007), (2) Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, (3) Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing), (4) Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional (5) Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu (6) K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah (7) Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya, Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau

sejenisnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah serta Pengadaan aset Belanja Barang Fisik Lainnya.

Sedangkan Dana Satker (Satuan Kerja) di daerah terbagi kedalam 2 (dua) Jenis Satker, Yaitu Satker Pusat, adalah satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah serta Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.

Satker dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran Satker yang ada di Daerah. Peran Koordinasi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dalam rangka koordinasi memberikan input menyusun rencana kerja dan anggaran satker secara jelas, terencana dan berkesinambungan (expenditure framework) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (public services) di daerah.

2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSPL/CSR)

Sumber alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah pelibatan pihak swasta melalui menggunakan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSPL/CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemeritah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya

TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

- a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;

- f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya:

- a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL;
- d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan.

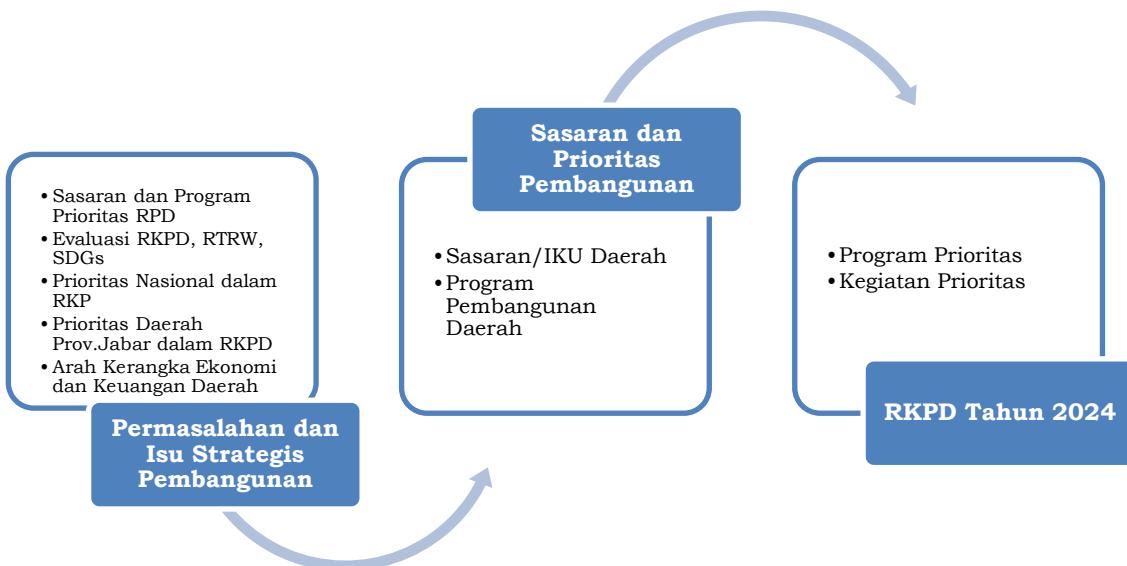
3. Pemanfaatan Dana Umat.

Pemanfaatan dana umat yang himpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti LAZNAS, yayasan untuk mendukung pembangunan melalui cara mengsinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2024 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Rumusan RKPD Kota Tasikmalaya



Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis berpedoman pada sasaran dan program prioritas RPD, hasil evaluasi RKPD, RTRW, evaluasi pencapaian SDGs, dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas daerah provinsi Jawa barat dan arah kerangka ekonomi dan keuangan daerah provinsi Jawa Barat. Selanjutnya permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan yang diindikasikan dengan sasaran atau indikasi dan program pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD Tahun 2023-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah “Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, dengan 5 (lima) tujuan, dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mengacu pada (1) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

dan Prioritas Pembangunan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, (2) hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, (3) RTRW 2011-2031, (4) SDGs dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, (5) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Awal RKP (6) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat (7) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu efisiensi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2024 tetap bertumpu pada pemulihan ekonomi. Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2024 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro serta koperasi, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan, dan pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
 - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
 - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
 - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
 - a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
 - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
 - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
 - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
 - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
 - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
 - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
 - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
 - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
 - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
 - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
 - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
 - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
 - a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - b) Infrastruktur Ekonomi;
 - c) Infrastruktur Perkotaan;
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
 - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

- c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
 - a) Konsolidasi Demokrasi;
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c) Penegakan Hukum Nasional;
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2022. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah beberapa tahun sebelumnya indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Capaian ini cukup baik mengingat pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi sebesar -2,07 persen pada tahun 2020.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, *artificial intelligence (AI)* dan big data, disrupti rantai pasok global, dan pergeseran pola

kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- a. Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi;
- b. Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas;
- c. Windfall yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.

Sementara di tahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,4 – 5,7 persen, yang didorong oleh:

- a. Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali;
- b. Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Investasi memiliki kecenderungan mengalami perlambatan pada tahun politik yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu untuk menjaga kestabilan politik untuk mengurangi ketidakpastian.

Agenda tahun 2024 antara lain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, Jajaran Pemerintahan Baru (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah) dan Pemindahan IKN Tahap Awal dan Keberlanjutan Pembangunan.

Highlight Isu Strategis dalam Pengembangan Wilayah:

1. Pengembangan kawasan strategis (KI, KEK, KPBPB, KSPN/DPP) dengan meningkatkan peran badan memanfaatkan pengelola kawasan dalam peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perkotaan yang lebih holistik dan trans-sektoral.
4. Penyelesaian rencana tata ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan berbasis elektronik, peningkatan hukum hak atas tanah, perizinan kepastian peningkatan serta pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan kawasan transmigrasi, tertinggal, perdesaan, dan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan aksesibilitas, kapasitas SDM sebagai ketimpangan antarwilayah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk penyediaan pelayanan dasar.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas,

terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,0
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 27,3
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,6 – 4,3
4. Rasio Gini (nilai) 0,360 – 0,374
5. IPM 75,54 poin
6. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0

4.1.2.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (RPD 2024-2026)

RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 merupakan RKPD tahun pertama yang mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Isu strategis RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang berkelanjutan;
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026, Pembangunan Provinsi Jawa Barat memiliki tema "Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat". Untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tujuan		Sasaran
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat
	2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3.	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
	4.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda
	5.	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan
	2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan
	3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum
	4.	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1.	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur
	2.	Meningkatnya Kualitas infrastruktur
	3.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
	4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	5.	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana
	6.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan
4. Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	1.	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi
	2.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
	3.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

4.1.3.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”

Visi tersebut mengandung makna:

- Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.

2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.
3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.
4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran yaitu:

S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Tujuan 2: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran yaitu:

S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;
S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas;

S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Tujuan 5: Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu:

S11. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan sasaran pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 4.2.
Keselarasan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya
2023-2026 dengan Sasaran RPJMN 2020-2024

Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 4: “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
Sasaran nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
Sasaran nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
Sasaran nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah”	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan”	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2022	2023	2024	Perubahan 2024
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial		IT.1. Angka kemiskinan	(%)	12,72	11,53	11,33	11,33
		S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	12,72	11,53	11,33	11,33
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	94,18	100	90	100
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal		IT.2. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,83	75,47	74,28	75,65
		S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,53	9,54	9,89	9,55
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,49	13,52	13,50
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%	84,53	95,73	75	95,80
		S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,63	75,08	72,69	75,26
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	81,59	98,12	80	98,5
		S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32	1,27	0,61	0,61
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender	poin	59,81	59,81	60,10	60,10
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender	poin	91,87	92,96	91,94	93,0
		S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	-	8,8	3,30	8,8
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	60	52,38	36,59	52,38
			IS.13. Persentase Pelestarian Kebudayaan	%	-	64,65	68,63	68,63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2022	2023	2024	Perubahan 2024
		S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	86,67	99,67	100	100
			IS.15. Indeks Resiko Bencana	Poin	-	Sedang (114,69)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)
3	T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas		IT.3. PDRB adh Berlaku	Triliun	24,97	27,41	25,21	27,51
		S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	5,96	5,69	5,69
			IS.17. PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	34,05	36,95	34,35	36,98
			IS.18. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	10,578	11,063	10,580	11,141
			IS.19. Indeks Gini	Poin	0,405	0,428	0,380	0,400
		S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.20. Inflasi	%	6,65	2,84	3.11	2,65
			IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,62	6,55	5,77	6,50
			IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	8.072,08	8.968,07	8.283,45	9.208,07
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Poin	-	71,95	74,48	74,48
		S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan	poin	-	65,47	62,05	65,50
			IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni	poin	-	23,33	31,77	31,77
			IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	98,22	94,74	98,74
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	%	60	99,29	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2022	2023	2024	Perubahan 2024
		S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	51,94	57,02	58,15	58,15
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah	%	81,77	82,17	99	99
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	97,02	98,2	80	98,5
5	T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/Poin	(B) 61,70	BB (78,74)	B (60,00-70,00)	BB (78,74-78,85)
			IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Baik (83,32)	Baik 87,12	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (87,12 - 88,30)
			IS.31. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Inovatif (38,70)	Inovatif (46,7)	Inovatif (52,43)	Inovatif (52,43)
			IS.32. Indeks SPBE	Kategori/Poin	Baik (2,62)	Baik (3,25)	Baik (3,0)	Baik (3,30)
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP*	WTP	WTP	WTP
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	BB (70,73)	BB (71,83)	BB) (72,50-75,00)	BB) (72,50- 75,00)
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	3,37 (sangat tinggi)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data diolah 2024

Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah sebanyak 24 (dua puluh empat) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan yakni:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: memenafaatkan dan memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial; konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial; intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan; peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi: memperkuat penyelenggaraan tat kelola kependudukan; reformasi sistem perlindungan sosial; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok; menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: meningkatkan kualitas teknologi informasi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi; meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilakukan melalui strategi: melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan

pesisir); konservasi lahan produktif; menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilakukan melalui strategi: meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; meningkatkan ketahanan air ditingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air; meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara, dilakukan melalui strategi: membangun gedung pemerintahan dan hunian; membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan pemilu 2024, dilakukan melalui strategi: mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal; meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024; mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Berikut ini merupakan 7 (tujuh) PN dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
 - 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan.
Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
 - 2) Terjadinya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

3. PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
 - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 - 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
 - 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
 - 2) Meingkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
 - 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
 - 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuuh karakter bangsa.
 - 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
 - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan.
 - 4) Meningkatnya layanan infrasatruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.
 - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.
 - 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polihukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpelihara kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal.
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri.

- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2.Telahaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yakni: "Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat".

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan BerkelaJutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024.

Tabel 4.4.
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	P2 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama
	P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan BerkelaJutan	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan BerkelaJutan, serta Pengembangan Pariwisata
Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang BerkelaJutan	P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
	P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Reformasi birokrasi dan Inovasi Daerah	P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

4.2.5.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah "Dengan Iman dan

Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.* Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa
- 2) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum

Strategi pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) strategi pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: penetapan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang dan mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional
- 2) strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan meliputi: peningkatan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan, penembangan jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar, peningkatan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi massal, peningkatan fungsi terminal angkutan umum, dan peningkatan integrasi sistem antar moda transportasi.
- 3) strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum melalui pendistribusian sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi dan hierarki pelayanan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana sumber daya air, peningkatan sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana pengelolaan air limbah, dan pengembangan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

Adapun kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi:

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) Penetapan kawasan yang berfungsi lindung

- b) Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun
 - c) Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung
- (2) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Penetapan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya
 - b) Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
- (3) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
 - b) menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
 - c) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
 - d) mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- (1) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi:
- a) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
 - b) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- (2) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, dilaksanakan dengan strategi:
- a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b) menerapkan insentif dan disinsentif.
- c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

- (1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
- a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
 - b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
 - c) pengembangan sentra bisnis baru
 - d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan

Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari

- (2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan
 - b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.
- (3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
 - b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, pada Tahap III (2021-2025) adalah sebagai berikut:

A. Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
 - 1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)
 - a. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional.
 - b. Pengembangan TPPAS Ciangir.
 - 1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)
 - a. Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
 - b. Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 1.3. Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Penyediaan Sarana Pelayanan
 - 1.4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL), Penyediaan Sarana Pelayanan
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota
 - 2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Di Wilayah Kota
 - 2.1.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya
 - a. Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder
 - b. Peningkatan jaringan jalan kolektor

- c. Pembangunan jaringan jalan kolektor
 - d. Pengembangan Flyover atau Interchange, dan atau Underpass
 - e. Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan
 - f. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
 - g. Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street)
 - h. Pembangunan Halte/ Shelter
 - i. Pembangunan Jembatan Penyebrangan
- 2.1.2. Pengembangan Angkutan Umum
- a. Pengembangan Angkutan Umum Trayek
 - b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
- 2.2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
- a. Pengembangan BTS Terpadu
 - b. Pengembangan Sistem Informasi
 - c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - d. Penyediaan Database Kota Tasikmalaya
 - e. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat
 - f. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - g. Pembinaan Pengelolaan Website OPD
 - h. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik
- 2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- 2.3.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
- 2.3.2. Program Penanggulangan Banjir
- a. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol
 - b. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel
 - c. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh
 - d. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban
 - e. Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya
- 2.4. Rencana Sistem Infrastruktur
- 2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pengembangan pelayanan air minum
 - b. Perlindungan dan pemanfaatan mata air
- 2.4.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah
- a. Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS
 - b. Rehabilitasi IPLT

- c. Pembuatan IPAL
- d. Pemasangan perpipaan SPAL
- e. Pengembangan Kawasan Permukiman
- f. Pengembangan IPAL industri di Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudungan

2.4.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

- a. Pengadaan Pewadahan Sampah
- b. Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional
- c. Koordinasi Penilaian Kota / Adipura
- d. Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah
- e. Pengadaan Pakaian Kerja

2.4.4. Sistem Jaringan Drainase

- a. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)
- b. Pembuatan sistem saluran drainase tersier
- c. Lanjutan Pembuatan Trotoar dan drainase
- d. Pemeliharaan Trotoar dan drainase Kota Tasikmalaya

2.4.5. Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana

- a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
- b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

B. Perwujudan Pola Ruang

1. Perwujudan Kawasan Lindung

- a. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
 - i. Pengembangan Sempadan Sungai
 - a. Rehabilisasi reboisasi dan konser\asi kawasan sempadan sungai
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai
 - ii. Pengembangan Sempadan Danau
 - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konser\asi kawasan sempadan danau
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau
 - iii. Pengembangan Sempadan Mata Air
 - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air
 - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air
- b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - i. Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan
 - a. Rencana Jalan Lingkar Utara
- c. Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

2. Perwujudan Kawasan Budi Daya

- a. Pengembangan kawasan permukiman
- b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa
 - a). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan
 - b). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/ Kelurahan
 - c). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan
 - d). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK
 - e). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kota / Regional
 - f). Pengembangan Pasar Induk Agribisnis
- c. Pengembangan Perkantoran
 - a). Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
 - b). Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Dinas Badan Lembaga Kantor (Dibaleka) Pemerintah Kota Tasikmalaya
- d. Pengembangan Industri, Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- e. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan wisata belanja
- f. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - a). Pengembangan RTNH pada Sub-Kawasan
 - b). Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota
 - c). Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu
 - d). Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir
- g. Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal, Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal
- h. Pengembangan Kawasan Pertanian
 - a). Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
 - b). Pengembangan pertanian tanaman pangan
 - c). Pengembangan kawasan pertanian hortikultura
 - d). Pengembangan kawasan perkebunan
 - e). Pengembangan Kawasan Perikanan
 - f). Pengembangan Kawasan Peternakan.

4.2.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengejawantahkannya kewajibannya sebagai representasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu:

- a. Wilayah Dapil I meliputi: Kecamatan Cihideung; Kecamatan Tawang; dan Kecamatan Bungursari.
- b. Wilayah Dapil II meliputi: Kecamatan Cipedes; dan Kecamatan Indihiang.
- c. Wilayah Dapil III meliputi: Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Purbaratu
- d. Wilayah Dapil IV meliputi: Kecamatan Mangkubumi; dan Kecamatan Kawalu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses pelaksanaanya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian oleh anggota dewan mengfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

2. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait

dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelesaikan masalah yang tersampaikan melalui selama proses rapat dengan pendapat. Laporannya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3. Kunjungan Kerja

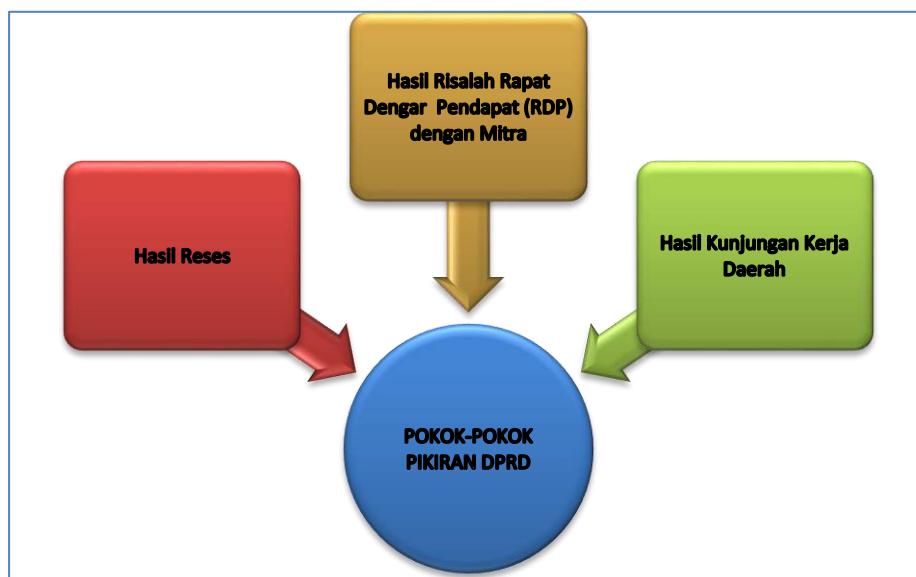
Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Proses kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 170/ Kep.01/DPRD 2022 tentang Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 4.2.

Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Tasikmalaya Tahun 2022



Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023

Beberapa pokok pikiran DPRD antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan peran pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan

- pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya;
3. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;
 4. Meningkatkan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;
 5. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;
 6. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningakatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja.
 7. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;
 8. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka akses bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;
 9. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai.
 10. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
 11. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan penerapan merit system dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

4.2.4.1. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya

Perumusan isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD, arah kebijakan RKP dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti ancaman resesi global. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada:

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Angka Kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 12,72 persen, capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Meskipun terjadi penurunan, namun kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di Kota Tasikmalaya. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha. Adapun untuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 23,88 ribu orang menurun dari tahun 2022 sebanyak 27,17 ribu orang.

Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 yang mencapai 733.467 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,53 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,47 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi, pengidap HIV Aids, Tubercolosis dan Malaria. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalah yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan terjadinya kontraksi

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen. Seiring dengan berakhirnya pandemic Covid-19, secara perlahan ekonomi Kota Tasikmalaya mulai bangkit yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di angka 3,57 persen pada tahun 2021 dan 5,01 persen pada tahun 2022. Namun, capaian ini masih belum optimal, sehingga diharapkan ekonomi kota Tasikmalaya dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Fenomena fluktuasi harga komoditas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat 6,65 persen. Hal ini merupakan inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan inflasi beberapa tahun sebelumnya, sehingga program pengendalian inflasi di Kota Tasikmalaya harus dilaksanakan secara optimal guna menjaga kestabilan harga dan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

Selain permasalahan di atas, pemasalahan lainnya dalam bidang ekonomi adalah tingginya inflasi yang mencapai angka 6,56 persen. Tingginya inflasi ini disebabkan oleh naiknya beberapa komoditi terutama telur, beras dan BBM. Kondisi ini semakin memperberat daya beli masyarakat, sehingga harus ada penanganan dan pengendalian terhadap inflasi ini.

4. Infrastruktur dan penataan ruang

Pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkar utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Permasalahan lainnya adalah pengelolaan sampah, dimana Kota Tasikmalaya menghasilkan timbulan sampah sebanyak 315 ton/hari. Dengan kondisi TPS ciangir yang kapasitasnya semakin mengecil harus ada upaya untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPS Ciangir. Apabila sampah tidak tertangani maka akan berakibat pada permasalahan lingkungan lainnya seperti kepada kesehatan masyarakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya melalui pembangunan bank sampah, pengelolaan sampah 3R dan pembudidayaan maggot dalam pengurangan sampah organic.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM apartur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antaralain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya. Sesuai dengan ketentuan Kemenpan bahwa Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu RB tematik dan RB regular.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPD tahun 2023-2026, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
2. Kualitas SDM yang berdaya saing
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman
5. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024, maka perlu ditetapkannya strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024, mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersedian Data Penduduk miskin secara akurat dan terpadu 2. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, 3. Pemberdayaan masyarakat miskin, 4. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data Kemiskinan dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum /metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</p> <p>4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah</p>	<p>perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</p> <p>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</p> <p>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p>
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	<p>1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan.</p> <p>2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</p> <p>3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</p> <p>4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</p>
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	<p>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</p> <p>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama air minum dan air limbah yang layak.</p> <p>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	<p>2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>3. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</p>
T.5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</p> <p>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, fokus pembangunan Kota Tasikmalaya atau Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah:

“Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat”

4.2.4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2023 dan prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan isu strategis pembangunan, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yang meliputi:
 - a. Mengurangi beban masyarakat miskin, diantaranya melalui:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin melalui Bantuan pangan;
 - 2) Peningkatan pelayanan sosial masyarakat miskin melalui Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - 3) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat miskin melalui beasiswa mahasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - 5) Peningkatan pelayanan keluarga berencana masyarakat miskin;
 - 6) Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan masyarakat miskin melalui sosialisasi dan fasilitasi jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin;
 - 7) Peningkatan pelayanan perumahan dan sanitasi masyarakat miskin antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan SPAM dan SPAL;
 - 8) Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan kompetensi, pemberdayaan masyarakat miskin dan usaha mikro;
 - c. Meningkatkan pengelolaan data, kolaborasi, sinergitas dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Kualitas SDM yang berdaya saing, melalui:
- a. Peningkatan akses pelayanan pendidikan diantaranya melalui Program Gasing, Lomba Cerita Islami;
 - b. Peningkatan akses pelayanan kesehatan;
 - c. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
 - d. Peningkatan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah.
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:
- a. Pengendalian inflasi daerah;
 - b. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang berdaya saing;
 - c. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dunia kerja;
 - d. Peningkatan dan pengembangan UMKM;
 - e. Peningkatan dan pengembangan perikanan dan pertanian;
 - f. Peningkatan dan pengembangan pariwisata diantaranya melalui Tasik City Tour;
 - g. Peningkatan dan pengembangan perdagangan;
 - h. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.
4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman, melalui:
- a. Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - b. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana konektivitas daerah;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan ruang;
 - g. Peningkatan kualitas bangunan gedung.
5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi, melalui:
- a. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak;
 - b. Optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, lincah, dinamis dan profesional;
 - c. Peningkatan inovasi daerah;
 - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya melalui program Musapahah (Makan-makan Upload Struk Dapat Hadiah), WA blast;
 - e. Penataan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. Peningkatan komunikasi dan informasi pelayanan publik diantaranya melalui program Sibaraya (Saluran Internet Bebas Akses Rakyat Tasikmalaya), Kelom (Kelurahan On Mobile), Whatsapp Tasik.

Dalam rangka akselerasi pembangunan, pada tahun 2024 dilaksanakan juga program dengan pendekatan Thematic, Holistik, Intergatif dan Spasial (THIS), yang meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:

- a. Mengurangi beban masyarakat miskin, diantaranya melalui:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin melalui Bantuan pangan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 2) Peningkatan pelayanan sosial masyarakat miskin melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - b. Program Bageur yang merupakan kolaborasi pemerintah Kota Tasikmalaya dengan sektor swasta dan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi “Bageur”;
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat miskin dilaksanakan melalui bantuan pendidikan dasar (Program Indonesia Pintar /PIP) oleh Dinas Pendidikan dan beasiswa mahasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi oleh Dinas Sosial;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh Dinas Kesehatan;
 - 5) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana masyarakat miskin oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan masyarakat miskin melalui sosialisasi dan fasilitasi jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - 7) Peningkatan pelayanan perumahan dan sanitasi masyarakat miskin antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pembangunan SPAM dan SPAL oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 8) Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi melalui penyediaan *hot spot* publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui:
 - 1) Peningkatan kompetensi atau keterampilan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat miskin oleh Kecamatan dan Kelurahan melalui Dana Kelurahan;
 - 3) Pemberdayaan Petani miskin oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 4) Pembinaan usaha mikro masyarakat miskin oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Meningkatkan pengelolaan data, kolaborasi, sinergitas dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Kecamatan, swasta, NGO dan masyarakat;

2. Penanganan Stunting, melalui:

a. Intervensi Spesifik

- 1) Layanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan kegiatan berupa pelayanan kesehatan untuk penanganan stunting diantaranya melalui pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan bagi anak stunting, ibu hamil dan keluarganya;
- 2) Layanan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program preventif diantaranya pembinaan bagi remaja dan calon pengantin;
- 3) Layanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan melalui pembinaan peserta didik pada jenjang pendidikan usia dini (PAUD);
- 4) Kewilayahan oleh Kecamatan dan Kelurahan melalui monitoring dan evaluasi penanganan stunting di wilayahnya.

b. Intervensi Sensitif

- 1) Penyediaan pangan bergizi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Pelayanan sosial bagi anak stunting oleh Dinas Sosial;
- 3) Rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pelayanan air minum dan sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 5) Dukungan non implementatif oleh seluruh perangkat daerah dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* diantaranya melalui program dan aplikasi *one ASN one stunting*;
- 6) Layanan Dapur Masyarakat Khusus Untuk Stunting (Damaskus) oleh Kecamatan dan Kelurahan;
- 7) Layanan teknologi informasi dan publikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya melalui aplikasi Silih Asih dan WhatsApp App blast.

3. Pengendalian inflasi daerah diantaranya melalui:

a. Menjamin ketersediaan pasokan

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan, peningkatan produktivitas lahan, dan pemanfaatan kartu tani dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Ketersediaan infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3) Peningkatan kelembagaan pemasok pangan dan non pangan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Perbankan;
- 5) Pembentukan *Offtaker* melalui lembaga koperasi/BUMD/Swasta oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

b. Meningkatkan kelancaran distribusi

- 1) Peningkatan infrastruktur perdagangan

- a) Sarana konektivitas (jalan dan jembatan) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b) Revitalisasi pasar rakyat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan diantaranya penyediaan kendaraan logistik (Mobil Inflasi) untuk menyuplai barang komoditi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan swasta;
- 2) Peningkatan infrastruktur pendukung perdagangan melalui pemeliharaan sarana dan prasana lalu lintas jalan dan pengoperasian angkutan serta rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- c. Menjaga keterjangkauan harga
 - 1) Menjaga stabilitas harga
 - a) Operasi pasar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Bank Indonesia dan Bulog;
 - b) Fasilitasi gelar pangan murah oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Bulog dan Kecamatan;
 - c) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/peternakan unggulan daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, swasta dan lembaga lainnya;
 - 2) Mengelola Permintaan
 - a) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Pengembangan Rumah/ Pekarangan Pangan Lestari diantaranya melalui program “Sejuta Tanaman Pangan Cegah Inflasi Kota Tasikmalaya (Setaman Cinta)” oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari di Sekolah oleh Dinas Pendidikan;
 - d) Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari di lingkungan perkantoran dilaksanakan oleh seluruh Perangkat daerah dan swasta;
 - e) Peningkatan keamanan Pangan Segar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 - d. Meningkatkan komunikasi efektif
 - 1) Peningkatan Kualitas Data
 - a) Pemantauan peredaran barang dan harga barang secara berkala dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b) Optimalisasi publikasi data dan harga pada media massa dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c) Analisis Inflasi dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
 - 2) Peningkatan Koordinasi

- a) *High level meeting* dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Bank Indonesia dan *stakeholder* lainnya;
- b) Optimalisasi pengelolaan inflasi daerah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara berkala.

4. Pengelolaan Persampahan

a. Pengurangan sampah

- 1) Pembentukan bank sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Pembudidayaan Maggot dan pembinaan budidaya Maggot meliputi penyediaan bibit, sarana dan prasarana, fasilitasi pemasaran, oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 3) Gerakan Olah Sampah Organik (GOSO) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan;
- 4) Pembentukan dan Pembinaan TPS 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Sapu Bersih Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik Kota Tasikmalaya (Gedong Resik) oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan dan Kelurahan.

b. Penanganan sampah

- 1) Penanganan TPS liar melalui pembentukan Satgas Tasik Resik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh perangkat daerah;
- 2) Monitoring dan penertiban TPS liar oleh Kecamatan dan Kelurahan;
- 3) Pelayanan penanganan persampahan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPS dan TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pengurangan Pengangguran

a. Perluasan kesempatan berusaha

- 1) Pembentukan dan pembinaan pelaku usaha dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Pengembangan destinasi wisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Pemanfaatan *marketplace* diantaranya melalui aplikasi Balantik dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

b. Perluasan kesempatan kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui:

- 1) Pelatihan kompetensi kerja bagi para pencari kerja;
- 2) Penyerapan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*) bekerjasama dengan perusahaan;
- 3) Optimalisasi *link and match* antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan;
- 4) Kerjasama dengan LPK dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja melalui pelatihan.

c. Peningkatan investasi daerah

- 1) Kemudahaan perijinan melalui digitalisasi perijinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2) Promosi investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Insentif investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Kondusifitas daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

d. Pengembangan potensi daerah

- 1) Pengembangan produk unggulan daerah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Pembinaan serta pemberdayaan pemuda dan pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

6. Katasik (Kawasan Wisata Tematik)

Program ini merupakan program integrasi dan lintas sektor untuk menata dan memberdayakan lingkungan dengan berbasis pada RT/ RW di Kota Tasikmalaya. Program ini meliputi:

- a. Peningakatan perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- b. Fasilitas Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- c. Rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penanganan Stunting dan perlindungan anak seperti pencegahan adanya *bullying* dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengelolaan sampah melalui bank sampah, pengelolaan maggot, komposting dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Penyediaan sanitasi lingkungan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. Ketahanan Pangan dengan melibatkan KWT, Poktan, dan Pokdakan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- h. Keindahan lingkungan melalui mural, konten dan promosi dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Penanganan masalah sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- j. Pelatihan usaha produk warga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Ketertiban dan ketentraman lingkungan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
- l. Dukungan teknologi informasi seperti aplikasi, CCTV, Scan QR Code, dan Wifi Publik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

- m. Pembentukan lingkungan tangguh bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Camat dan Lurah;
- o. Pembinaan mental spiritual dan tata nilai kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- p. Koordinasi dengan dinas dan intansi terkait dilaksanakan oleh Camat dan Lurah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPD
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026
1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
2. Kualitas SDM yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat 5. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 6. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 7. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 8. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya 10. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif 11. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan 7. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 8. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 9. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja
4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama air minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. 5. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah
5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai. 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Sumber: hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

Prioritas pembangunan tahun 2024 disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah. Berikut keterkaitan prioritas pembangunan dengan isu strategis pembangunan tahun 2024.

‘’

Tabel 4.7.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin
2. Kualitas SDM yang berdaya saing	Kualitas SDM yang berdaya saing
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	Infrastruktur perkotaan dan permukiman
5. Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi

Sumber: hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

Selain berkaitan dengan isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.8.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya; 2. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan; 3. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah; 4. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningakatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja. 	1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan peran pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik; 2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya; 3. Meningkatkan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum; 4. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningakatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja. 5. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai. 	2. Kualitas SDM yang berdaya saing
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah; 2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningakatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja. 3. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka akses bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing; 4. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai. 	3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan; 2. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau; 	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, 2. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan penerapan merit system dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 	5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi

Sumber: hasil analisa Bappelitbangda, 2023.

Prioritas pembangunan tahun 2024 selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program perangkat daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.9.
Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Program Prioritas

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
1	Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin									
	a Pemberdayaan masyarakat miskin	S1: Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	11,33	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif	%	100	Dinas Sosial
	b Bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin		IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	Dinas Sosial
	c Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	Dinas Sosial
	d Beasiswa mahasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi					Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	100	Dinas Sosial
	e Bantuan pangan					Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	Dinas Sosial
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	84	Dinas Kesehatan
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	2,63	Disperwaskim
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/ Kap/ Tahun	22,5	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
							Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	310	DKP-3	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	DKP-3	
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	6.000	DKP-3	
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	75.000	DKP-3	
2	Kualitas SDM yang berdaya saing										
	a	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	S.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		9,89	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Non Formal/Kesetaraan Terakreditasi B	%	51,90	Disdik
								Persentase PAUD Terakreditasi B	%	35,79	Disdik
								Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	67,45	Disdik
								Persentase SD Terakreditasi A	%	60,32	Disdik
								Persentase SMP Terakreditasi A	%	58,25	Disdik
				IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)		13,52	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	100	Disdik
				IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)		95,80	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	51,50	Disdik
							Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	25,05	Disdik
							Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	%	4,42	Dispusipda
								Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum	%	38	Dispusipda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							daerah dengan standar nasional perpustakaan			
						Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	26,19	Dispusipda
b	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun)	%	75,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Faskes dengan SIK terintegrasi	%	100	Dinkes
							Cakupan Kinerja Layanan P2P	%	100	Dinkes
							Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	%	78	Dinkes
							Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	34,6	Dinkes
							Cakupan penelitian kesehatan	%	100	Dinkes
							Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk. Kota yang diberi ijin	%	100	Dinkes
							Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	%	100	Dinkes
							Indeks Keluarga Sehat	poin	0	Dinkes
							Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	100	Dinkes
							Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	84	Dinkes
							Rasio Faskes terhadap penduduk	%	1,1	Dinkes
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)	%	98,5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	94	Dinkes

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	80	Dinkes
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	%	50	Dinkes
c	Peningkatan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	%	0,61	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dok	1	DPPKBP3A
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	60,10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	100	DPPKBP3A
							Persentase Kepesertaan Unmet Need	%	13,25	DPPKBP3A
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	93,0	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang ber-KB	%	82,03	DPPKBP3A
							Cakupan Anggota BKL yang ber KB	%	75,47	DPPKBP3A
							Cakupan Anggota BKR yang ber KB	%	77,11	DPPKBP3A
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase capaian PUG SKPD yang Responsif Gender	%	100	DPPKBP3A
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	DPPKBP3A
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus	%	100	DPPKBP3A
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembinaan Lembaga yang Peduli	%	100	DPPKBP3A

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
							dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus anak	%	100	DPPKBP3A	
	d	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat Provinsi (%)	%	8,8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	%	30,77	Disporabudpar
				IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat Provinsi (%)	%	52,38	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	36,59	Disporabudpar
				IS.13. Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)	%	68,63	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	68,63	Disporabudpar
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	25	Disporabudpar	
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	%	25	Disporabudpar	
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	53,85	Disporabudpar	
	e	Peningkatan stabilitas ketenteraman dan ketertiban daerah	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	%	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	94	SatPolPP
							Presentase PPNS Yang di Bina	%	81	SatPolPP	
							Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	%	100	SatPolPP	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
			IS.15. Indeks Resiko Bencana (Kategori/poin)	Poin	Sedang (117,15)	Program Penanggulangan Bencana	Percentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana,	%	100	BPBD
							Percentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana,	%	100	BPBD
							Percentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	100	BPBD
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	86	BPBD
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Percentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Bakesbangpol
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Percentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Percentase penanganan konflik sosial	%	100	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Percentase partai politik yang dibina	%	100	Bakesbangpol

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	%	71	Bakesbangpol	
3	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan										
	a	Pengendalian inflasi daerah	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,69	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	100	Dinas KUMKM Perindag
	b	Peningkatan dan pengembangan UMKM		IS.17. PDRB Perkapita (Juta rupiah)	%	36,98	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi aktif	%	1	Dinas KUMKM Perindag
	c	Peningkatan dan pengembangan perikanan dan pertanian;		IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah)	Juta Rupiah	11,50	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	6	Dinas KUMKM Perindag
	d	Peningkatan dan pengembangan perdagangan		IS.19. Indeks Gini (Poin)	Poin	0,400	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	25	Dinas KUMKM Perindag
	e	Peningkatan dan pengembangan pariwisata		IS.20. Inflasi (%)	%	2,65	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	25	Dinas KUMKM Perindag
	f	Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag
							Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	5	Dinas KUMKM Perindag
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	6	Dinas KUMKM Perindag
							Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi penuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100 %	Dinas KUMKM Perindag

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	80 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	40 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	1 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang berteria sah	%	80 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	10 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	100	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	2	DKP-3
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	110,8	DKP-3
							Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	125,5	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program pengawasan Keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	100	DKP-3
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.100	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/ Kap/ Tahun	22,5	DKP-3
							Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	310	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	DKP-3
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	6.000	DKP-3
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	75.000	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka Produksi Hasil peternakan	Ton	10.400	DKP-3
							Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	63	DKP-3
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	%	100	DKP-3
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	75	DKP-3
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	ijin	3	DKP-3
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	5	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	61,22	Disporabudpar
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	542.625	Disporabudpar
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	56,67	Disporabudpar
g	Peningkatan iklim usaha dan inventasi yang berdaya saing	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6,50	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	5	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkattan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi <i>link and match</i> dunia kerja		IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	9.208,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Per센	29	Dinas Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Orang	54,50	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	100	DPMPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Milyar	1.304	DPMPTSP

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	100	DPMPTSP
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	DPMPTSP
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	25	DPMPTSP
							Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	75	DPMPTSP
4	Infrastruktur perkotaan dan permukiman									
a	Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan (poin)	%	65,50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	25	Dinas PUTR
b	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana konektivitas daerah		IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin)	%	31,77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	19,19	Dinas PUTR
							Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	50	Dinas PUTR
c	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air		IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	Poin	98,74	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	68,08	Dinas PUTR
d	Peningkatan kualitas bangunan gedung		IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)	Poin	100	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	49,12	Dinas PUTR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	Dinas PUTR

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	42,37	Dinas PUTR
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	57,26	Dinas PUTR
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	62,05	Dinas PUTR
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	100	Dinas PUTR
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	Disperwaskim
							Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	100	Disperwaskim
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	50	Disperwaskim
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	Disperwaskim
							Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	17,24	Disperwaskim
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	2,63	Disperwaskim
						Program Penyelenggaraan Lalu	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	78,32	Dishub

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
							Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	%	58,93	Dishub
e	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S10.Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Poin	58,15	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	Disperwaskim
f	Optimalisasi pemanfaatan ruang						Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	17,24	Disperwaskim
g	Peningkatan pengelolaan persampahan		IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah (%)	%	99	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah;	%	28	Dinas LH
							Persentase Penanganan Sampah	%	71	Dinas LH
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	%	98,5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air;	Poin	53,75	Dinas LH
							Indeks Kualitas Udara	Poin	80,50	Dinas LH
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang dikelola;	%	100	Dinas LH
							Indeks Kualitas Lahan	Poin	24,36	Dinas LH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	%	100	Dinas LH

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Percentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan diawasi Implementasinya	%	100	Dinas LH
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	Dinas LH
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	%	100	Dinas LH
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Percentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Percentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	Dinas PUTR
5	Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi									
a	Optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, lincah, dinamis dan profesional	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin/Kategori)	Poin	Baik (85,80 - 88,30)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Percentase konsistensi RKPD terhadap RPD/RPJMD	%	100	Bappelitbangda
b	Peningkatan inovasi daerah		IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori)	Poin	Inovatif (52,43)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berpredikat minimal baik	%	83	Bappelitbangda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
c	Penataan peraturan perundang-undangan daerah						Prosentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	100	Bappelitbangda
d	Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak		IS.32. Indeks SPBE (Kategori/Poin)	Poin	Baik (3,30)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	bah	11	Bappelitbangda
							Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	%	90	Bappelitbangda
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (Opini)	Opini	WTP	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Informatif (80%)	Diskominfo
							Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	Diskominfo
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori/Poin)	Kategori	BB) (72,50-75,00)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	Diskominfo
			IS.35.Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	Kategori	Sangat Tinggi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	42	Diskominfo
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	98	Disdukcapil
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	99,07	Disdukcapil

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	47,24	Dispuspida
							Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	86,11	Dispuspida
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	100	Bapenda
							Capaian Pajak Daerah	%	100	Bapenda
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat	%	100	Setda
							Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	Setda
							Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	Setda
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indek Kematangan UKPBJ	Level	5	Setda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	Setda
							Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	100	Setda
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	%	100	Set.DPRD
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	level	2	Inspektorat

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	level	2	Inspektorat
							% Penanganan kasus	%	100	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	%	100	Inspektorat
						Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	100	BKPSDM
							Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	100	BKPSDM
							Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	100	BKPSDM
							Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	12	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	18	BKPSDM
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	100	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	Kecamatan
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	100	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	Kecamatan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	Seluruh PD

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

4.2.5. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Tasikmalaya, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024
dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama 3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	2. Kualitas SDM yang berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama 6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	2. Kualitas SDM yang berdaya saing
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023.

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2024, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.11. Selain itu dukungan program prioritas daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 terhadap prioritas nasional yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas nasional Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.12. dibawah ini.

Tabel 4.11.

Keselarasan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024, Sasaran Prioritas Daerah RKPD Jawa Barat Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas Daerah RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
S1 Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan	S7 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah	S7 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)
		S8 Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)
S2 Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	S6 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S7 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) IS 18 Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) IS 19 Indeks Gini (Point) IS 20 Inflasi (%)
		S8 Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	IS 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
S1 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)		-	-
S2 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S6 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S7 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
S1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S5 Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S4 Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 8 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
S2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk		S1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS 1 Angka Kemiskinan (%) IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)
S3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	S2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS 3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IS 4 Harapan Lama Sekolah (Tahun) IS 5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)
	S2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS 6 Usia Harapan Hidup (Tahun) IS 7 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)
	S3 Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan S2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat S9 Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas	IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%) IS 5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) IS 6 Usia Harapan Hidup (Tahun) IS 7 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) IS 24 Persentase kawasan permukiman layak huni IS 26 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman
S4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4 Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4 Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) IS 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024		Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	
				S5	Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 11	Percentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%)
						IS 12	Percentase Capaian Prestasi Olahraga (%)
						IS 13	Percentase Pelestarian Kebudayaan (%)
S5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S10	Meningkatnya koneksi antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S1	Menurunnya tingkat kemiskinan	IS 1	Angka Kemiskinan (%)
S6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	S8	Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS 21	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
						IS 22	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
S1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S12	Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S5	Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 11	Percentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%)
						IS 12	Percentase Capaian Prestasi Olahraga (%)
						IS 13	Percentase Pelestarian Kebudayaan (%)
S2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S5	Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 13	Percentase Pelestarian Kebudayaan (%)
S3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS 2	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)
S4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024		Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	
S5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuuh karakter bangsa	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 9 IS 10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)	
S6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S15	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	S11	Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	IS 31	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
S1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S9	Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas	IS 23	Percentase Kemantapan Jalan (%)	
S2 Meningkatnya konvektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar					IS 24	Percentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	
S3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					IS 25	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	
S4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan					IS 26	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)	
S5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK							
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim							
S1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	IS 27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	
					IS 28	Percentase Pengelolaan Sampah (%)	
					IS 29	Percentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	
S2 Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	S12	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 15	Indeks Resiko Bencana (Point)	

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024		Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	
S3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline						
PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik							
S1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	S13	Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 14	Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)
S2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri		-		-		-
S3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	S13	Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 14	Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)
S4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S14	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S11	Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	IS 30	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)
						IS 31	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
						IS 32	Indeks SPBE (Point)
						IS 33	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)
						IS 34	Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori)
						IS 35	Nilai Evaluasi LPPD (Kategori)
						IS 36	Tingkat Maturitas SPIP (Level)
S5	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S13	Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 14	Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan daerah harus mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan daerah harus dapat mendukung program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12.

Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan		
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati		
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi		
		4. Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi		
		5. Peningkatan pemenuhan energi domestik		
		6. Pengembangan industri pendukung EBT		
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau		
		4. Pengembangan waduk multiguna		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar		1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian		1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		1. Program Penyuluhan Pertanian
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya		1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan		1. Program Penyuluhan Pertanian
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha		2. Program Pengembangan UMKM
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha		2. Program Pengembangan UMKM
				1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Program Pengembangan UMKM

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestariaan dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
1		4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		5. Pengembangan industri halal		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		2. Peningkatan akses dan pendalamannya pasar ekspor		1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Pengembangan UMKM
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif		1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0 3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga 4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				
1	Pembangunan Wilayah Sumatera			
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	1. Pengembangan Kawasan strategis 2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
			Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)
				4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
				5. Kelembagaan dan keuangan daerah
			Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 5. Program Aplikasi Informatika 6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				13. Program Penataan Organisasi 14. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 15. Program Penatagunaan Tanah
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara			
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan			
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi			
6	Pembangunan Wilayah Maluku			
7	Pengembangan Wilayah Papua			
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pendaftaran Penduduk
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		3. Pendampingan layanan terpadu		
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran		2. Program Rehabilitasi Sosial
		3. Perlindungan sosial adaptif		
		4. Kesejahteraan sosial		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun 3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penjaminan mutu pendidikan 5. Peningkatan tata kelola pendidikan	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan 3. Kualitas pemuda		
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial 3. Reformasi agraria 4. Perhutanan sosial	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial
7				1. Program Pengelolaan Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 2. Prestasi olahraga	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti 2. Revolusi mental dalam tata kelola 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter 4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila 5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pengembangan Sejarah 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3		1. Peningkatan budaya literasi		1. Program Pengelolaan Perpustakaan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta		1. Program Pengelolaan Pendidikan
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi		1. Program Pembinaan Perpustakaan
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman		1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi		1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penanggulangan Bencana
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Konektivitas darat	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan		
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)
4	Transformasi digital	1. Penunasan infrastruktur TIK		
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK		
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital		
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup		1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		2. Peningkatan ketahanan iklim		1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3. Pengelolaan limbah	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		4. Pengembangan industri hijau		
PN.07 Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri		
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		
		2. Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata		
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi		
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Transformasi Pelayanan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. Program Pengelolaan Arsip 3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 4. Program penelitian dan pengembangan daerah 5. Program pengembangan sumber daya manusia
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program penyelenggaraan pengawasan
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)		
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber		

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

4.2.5.1. Standar Pelayanan Minimal

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;

- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM:

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

4.2.5.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelarasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Keselarasan pelaksanaan SDGs ke dalam RKPD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.13.

Keterkaitan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	57,26%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	31,77%	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	25,79%	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,80%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,66%	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95%	Disdukcapil
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100 %	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	
		Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %	
Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	98 Kg/kap/Tahun	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	15%	
Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	86%	Dinas Kesehatan

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	25,79%	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,80%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,66%	
Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	60,10 Poin	Dinas PPKBP3A
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	57,26%	Dinas PUTR
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	53,75 Poin	Dinas LH
Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	-	-	-	-
Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5,56%	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	29%	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	56,67%	Disporabudpar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	56,67%	
		Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif	56,67 %	
Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	100 %	Dinas KUMKM Perindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	100 %	
Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	-	-	-	-
Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	57,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik	19,19 %	Dinas PUTR

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	4,84 %	
Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	86.000 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi hasil peternakan	10.400 Ton	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Produksi Perikanan Budidaya	10.100 Ton	
		Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	20 Unit	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian produksi hasil perikanan	10.100 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase peningkatan populasi ternak	1%	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Capaian Produksi Tanaman Pangan	86.000 Ton	
		Capaian produksi hortikultura dan perkebunan	6.000 Ton	
Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	-	-	-	-
Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-	-
Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	-	Dinas LH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Lokasi taman yang ditangani	100 %	Dinas LH
Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %	Badan Kesbang
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	65 %	
Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	7,82 %	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	-1,06%	
		Capaian Pajak Daerah	100 %	
		Capaian PAD bukan pajak daerah	100 %	
	Program Informasi Dan Komunikasi/ Publik	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	81 %	Dinas Kominfo

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Untuk itu inovasi di daerah perlu terus didorong dan dikembangkan karena inovasi di daerah akan menunjang peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan Daya Saing Daerah. Selain itu, inovasi daerah diharapkan dapat menjawab isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Peningkatan Efisiensi;
2. Perbaikan efektifitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak ada konflik kepentingan;
5. Berorientasi pada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; meliputi inovasi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen seperti e-planning, e-budgetting dsb.
2. Inovasi Pelayanan Publik; meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat; seperti pelayanan perijinan, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan social dsb.
3. Inovasi Daerah Lainnya; meliputi inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti; urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian dsb.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari

Kepala Daerah. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Adapun penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Inovation Government Award (IGA);
- 2) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD);
- 3) Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), dan
- 4) Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB).

Pada Tahun 2021 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada *Inovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021), Kota Tasikmalaya berada pada peringkat 64 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor 36,43 dengan kategori INOVATIF. Secara kategori terjadi peningkatan dari semula Kurang Inovatif pd tahun 2020.

Untuk tahun 2022 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada Inovation Government Award (IGA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tashun 2022 Kota Tasikmalaya berada pada peringkat 81 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor 38,70 dengan kategori INOVATIF.

Sebagai wujud kepedulian terhadap Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan terobosan baru dengan memberikan suatu apresiasi dan penganugerahan terhadap pelaku inovasi yang ada di Kota Tasikmalaya dengan melaksanakan *Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya*, yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Maksud dari penyelenggaraan Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya setiap tahun adalah sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya IPTEK yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah-masalah yang dihadapi daerah dan sekaligus membantu pengembangan potensi daerah.

Dalam perkembangannya Inovasi inovasi yang lahir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya masih memerlukan dukungan dan pembinaan, karena secara kuantitas masih sangat kurang jumlahnya dan inovasi yang dihasilkan belum berkualitas dan masih belum matang. Inovasi yang diciptakan banyak yang belum didukung oleh data data yang memadai. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasinya. Dengan semakin banyak jenis inovasi dari perangkat daerah dengan kualitas inovasi yang matang, akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan Indek Inovasi Daerah adalah:

1. Agar setiap Perangkat Daerah minimal mempunyai satu inovasi sesuai urusannya atau One Agent One Innovation;
2. Menetapkan Indeks Inovasi Daerah sebagai target kinerja dalam RPD Tahun 2023 – 2026.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan dikembangkan Tahun 2021-2022 dengan total jumlah 15 inovasi. Sedangkan untuk tahun 2024 inovasi yang akan dikembangkan untuk menjawab isu strategi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. INOVASI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERMASALAHAN SOSIAL MELALUI LAYAR KUSUMAH

Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan telah berjalan sejak Maret 2021. Inovasi Layar Kusumah dibuat untuk membantu meringankan beban para Pemerlu Layanan Permasalahan Sosial dalam kelangsungan hidupnya.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas dan Orang Terlantar. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin dan penyandang disabilitas adalah kesulitan dalam mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan permasalahan yang sering dihadapi oleh orang terlantar adalah sulitnya mendapatkan pelayanan transportasi gratis. Kenyataan dilapangan saat ini masyarakat miskin dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan selalu menggunakan jasa orang lain karena beranggapan bahwa untuk mendapatkan pelayanan sangatlah susah. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat miskin buta informasi dan transportasi sehingga oknum para penyedia jasa sangat mudah memanipulasi informasi.

Untuk penanganan terhadap ketiga permasalahan maka dikeluarkanlah Program Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) yang menjadi solusi dalam penanganan masalah yang terjadi dan meminimalisir oknum para penyedia jasa.

Tujuan dari Inovasi LAYAR KUSUMAH bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar. Inovasi dalam memberikan pelayanan sosial bagi warga miskin yang memerlukan bantuan pelayanan, baik layanan sosial maupun layanan kesehatan, dan kebutuhan transportasi berupa layanan antar jemput masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 460/kep.17.1-Dinsos/2021 tentang Bantuan Sosial Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kota Tasikmalaya;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor: 460/Kep-149 Dinsos/2020 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Untuk Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor: 520/036/Sekre tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
- 4) Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 460/ /Dinsos/2021;

- 5) Perjanjian Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya Nomor: 460/440/Dinsos/2021 tentang Peminjaman Kendaraan Ambulance dan Fasilitasi Donor Darah;
- 6) Perjanjian kerjasama dengan Rumah Singgah Al-Fatih Nomor: 460/441/Dinsos/2021 tentang Fasilitasi Pasien Rujukan Ke Rumah sakit Bandung.

Bentuk Inovasi LAYAR KUSUMAH termasuk pada inovasi pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini adalah alat tulis kantor, perangkat komputer, kendaraan roda dua untuk verifikasi kelayakan, roda empat ambulance untuk rujukan, kendaraan roda 4 untuk penjemputan, handphone, kamera digital untuk visualisasi dan media pengaduan masyarakat.

Untuk Inovasi LAYAR KUSUMAH telah dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 303 Orang yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) 40 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 69 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10 orang, Karang Taruna sebanyak 69 orang dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 115 orang. Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari adanya laporan langsung dari masyarakat atau adanya usulan pemerlu layanan dari kelurahan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, TKSK dan pendamping PKH untuk diusulkan ke Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Setelah proses usulan selesai Tim Reaksi Cepat (TRC) memverifikasi kelayakan calon penerima layanan, setelah diketahui kondisi dan kebutuhannya serta dianggap layak untuk menjadi penerima bantuan maka masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial kesehatan, penyandang disabilitas yang memerlukan terapi dan orang terlantar yang memerlukan bantuan, pelayanan pertama yang diberikan adalah bantuan transportasi dengan cara menjemput dari rumah atau lokasi kejadian dan didampingi hingga pemerlu layanan sampai kembali ke rumah. Tidak hanya sampai disitu tim yang terlibat dalam Program Inovasi LAYAR KUSUMAH juga membantu mengurus administrasi yang diperlukan sehingga penerima layanan tidak memikirkan masalah administrasi, biaya, termasuk tidak memikirkan untuk membayar para penyedia jasa.

Keluaran dari inovasi ini adalah:

- 1) Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar mendapatkan kemudahan dalam menempuh proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan transportasi tanpa memikirkan biaya.
- 2) Meringankan beban hidup serta memberikan rasa aman pada saat menjadi penerima layanan.

Perlu diingat bahwa masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam masalah kesehatan karena bagi mereka biaya kesehatan saat ini sangatlah tinggi dan tidak mungkin terjangkau. Melalui pelayanan Inovasi LAYAR KUSUMAH masyarakat mengetahui bahwa untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan bantuan tranportasi sangatlah mudah sehingga merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka yang sangat membutuhkan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan dampak dari pelaksanaan kegiatan Inovasi LAYAR KUSUMAH serta melakukan penilaian terhadap kinerja Sumber Daya Manusia yang terlibat, demi tercapainya

peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar.

Pada pelaksanaanya tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan, selalu ada halangan dan rintangan yang merupakan seni dilapangan dalam optimalisasi pelayanan. Kendala yang sering terjadi adalah:

- 1) adanya halangan dari pihak-pihak yang terganggu kepentingannya;
 - 2) terlambatnya penjemputan karena kekurangan kendaraan operasional seperti tidak memiliki kendaraan ambulance, bahkan untuk membuat masyarakat supaya tidak menunggu lama penjemputan sering menggunakan kendaraan jabatan yang tersedia di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
2. INOVASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA TASIKMALAYA

Program Keluarga Sejahtera dilaksanakan diantaranya untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang beranjak dari pembinaan terhadap remaja agar menjadi remaja tangguh melalui Pembinaan pola hidup sehat, pembinaan Perilaku ke arah yang lebih baik dan tidak terjerumus ke dalam hal yang tanpa perhitungan serta bertanggung jawab dalam segala hal. Pembinaan tersebut merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dan diharapkan dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan tidak stunting.

Kondisi saat ini jumlah remaja di Kota Tasikmalaya paling banyak ada di wilayah kecamatan Kawalu sebanyak 24.771 orang, Mangkubumi sebanyak 24.421 orang dan Cipedes sebanyak 19.543 orang serta jumlah remaja kurus di Kota Tasikmalaya sebanyak 1.841 orang, obesitas sebanyak 2.875 orang dan remaja anemia sebanyak 3.500 orang. Remaja kurus paling banyak berada di wilayah Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu sebanyak 387 orang, remaja dengan obesitas ada di wilayah Puskesmas Bantar Kecamatan Bungursari sebanyak 817 orang dan remaja Anemia ada di wilayah Puskesmas Panglayungan kecamatan Cipedes sebanyak 342 orang.

Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap pola hidup sehat bagi remaja, hal ini dapat kita lihat bahwa masih banyak remaja yang kurus, obesitas dan anemia, pernikahan dini serta remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi masih rendah. Dengan masalah tersebut maka penting bagi kita untuk memberikan suatu kegiatan yang unik yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang pola hidup sehat, salah satunya dengan cara kita mendekat kepada remaja, dimana mereka banyak meluangkan waktunya di tempat-tempat makan para remaja/tempat nongkrong bareng, sehingga dengan kegiatan itu kita dapat meningkatkan akses pelayanan, khususnya pola hidup sehat dan kespro bagi remaja putri

Solusi dari pemecahan akar masalah yang akan kita lakukan berdasarkan *brain storming*, kita merencanakan akan melakukan kegiatan inovasi "**Konseling Pola Hidup Sehat Remaja Putri Cegah Stunting (Kupat Rematri Ceting)**", target dari kegiatan ini adalah masyarakat, khususnya para remaja putri, dan hasil yang diharapkan adalah remaja putri yang teredukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dalam upaya pencegahan stunting serta tercapainya tujuan dari kegiatan ini adalah Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja

putri tentang pola hidup sehat untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan penurunan prevalensi stunting.

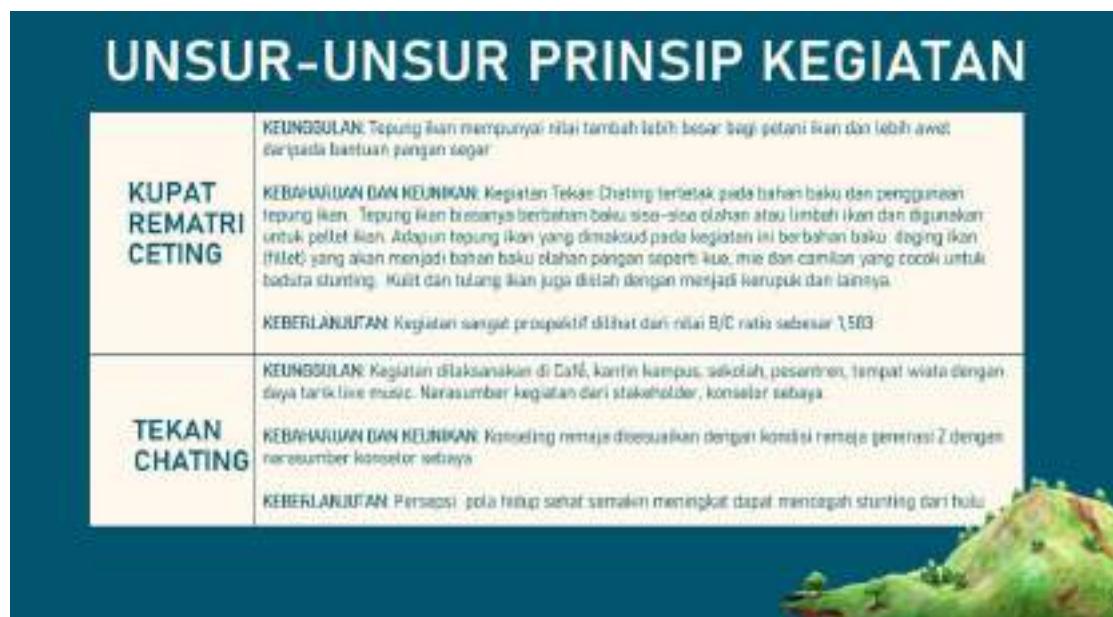
Guna mendorong efektifitas kegiatan KUPAT REMATRI CETING ini, maka dipandang perlu untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Gambar 4.3.
Mekanisme dan Rancangan Usulan Kegiatan Kupat Rematri



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2023

Gambar 4.4.
Unsur-Unsur Prinsip Kegiatan



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2023

3. INOVASI DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1) Gedong Resik

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya.

Permasalahan sampah di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tasikmalaya, seolah belum pernah terlihat ujungnya. Jumlah dan jenis sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Namun, laju solusi pengelolaan sampah masih tertinggal jauh di belakang. Ini terbukti dengan produksi sampah yang mencapai 67,2 juta ton tiap tahunnya (Indonesia National Plastic Action Partnership, 2020), dan 9 persennya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut. Keadaan ini ditambah lagi dengan beberapa TPA di wilayah Indonesia juga penuh, seperti TPA Bantar Gebang (Bekasi), TPA Piyungan (Yogyakarta), TPA Sarimukti (Bandung), TPA Terjun (Medan), TPA Suwung (Denpasar), juga TPA Ciangir di Kota Tasikmalaya. Permasalahan lainnya adalah perilaku masyarakat di Kota Tasikmalaya yang kurang peduli pada pola hidup sehat, khususnya dalam kebiasaan membuang sampah.

Dengan kondisi seperti ini, maka melalui kegiatan Gedong Resik penanganan sampah dilakukan dengan benar mulai dari sumbernya, dengan melibatkan masyarakat yaitu dengan memberikan edukasi dan mengajak kepada masyarakat untuk menerapkan hidup sehat di antaranya mengumpulkan sampah secara terpisah dari sumbernya. Tim Gedong Resik akan menyalurkan sampah yang terkumpul kepada tempat-tempat sesuai jenis sampahnya, yaitu ke bank sampah (untuk sampah anorganik), ke penggiat maggot (untuk sampah organik), dan ke pengepul (untuk jelatah). Selanjutnya sampah tersebut dikonversi menjadi dana yang kemudian dana tersebut kembali ke masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, masyarakat telah melakukan donasi dengan sampah dan berkontribusi pada pembangunan di Kota Tasikmalaya. Untuk lebih memudahkan dalam pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat, maka dilengkapi dengan sistem informasi (aplikasi) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dari kegiatan Gedong Resik ini diharapkan target pengurangan sampah Kota Tasikmalaya sebesar 30% dapat tercapai. Adapun rencana lokasi (CPCL) dari kegiatan ini tersebar di 69 kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, melatih masyarakat berbagi dan bersedekah, adanya program pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta dana dari hasil pengumpulan & penjualan sampah digunakan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar 4.5.
Rancangan dan Mekanisme Usulan Kegiatan Gedong Resik



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

2) Kompos Juara

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir telah mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Pengolahan air limbah domestik menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca terutama metana (CH_4), karbon dioksida (CO_2) dan dinitrogen oksida (N_2O). Emisi metana sebagian besar dihasilkan dari proses anaerobik. Emisi metana juga dapat dihasilkan dari akumulasi lumpur hasil olahan IPLT yang tidak termanfaatkan. Produksi CO_2 disebabkan oleh dua faktor utama proses pengolahan dan konsumsi listrik.

Kegiatan Kompos Juara: Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Dengan Produksi Kompos Cepat dan Pengolahan Lumpur Tinja Rendah Karbon di IPLT Singkup dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya dalam mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim pada sektor air limbah domestik dan energi. Tujuannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor pengelolaan limbah domestik dan Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik. Keunggulan dari inovasi pada kegiatan ini adalah pemanfaatan teknologi dalam untuk pengolahan air limbah domestik di IPLT untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan ini berupa DAF (Dissolved Air Flotation) sebagai pretreatment untuk mengurangi beban polutan lumpur tinja sebelum diolah di IPLT, mesin Kompos BCM-100 GEC untuk mengolah lumpur hasil olahan IPLT Singkup menjadi Kompos secara cepat (24 jam) dan penggunaan tenaga surya (solar cell) sebagai sumber energi.

Indikator kinerja (output) kegiatan ini adalah terbangun dan beroperasinya IPLT Singkup dengan teknologi DAF berkapasitas 5 m³/jam, beroperasinya produksi Kompos Juara dengan kapasitas 100 kg/hari dengan menggunakan sumber energi tenaga surya.

Kegiatan ini berlokasi di IPLT Singkup Kota Tasikmalaya. Dengan hal ini diharapkan penggunaan energi lebih efisien, berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi terhadap pemulihan lahan pertanian melalui pemanfaatan kompos hasil olahan IPLT sehingga meningkatkan produktifitas lahan pertanian, meningkatkan kinerja IPLT, dan meningkatnya akses sanitasi aman.

Gambar 4.6.
Rancangan dan Mekanisme Usulan Kegiatan Kompos Juara



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023

3) Pengelolaan Persampahan Kota Tasikmalaya

Di Kota Tasikmalaya, sekitar 300 ton sampah dihasilkan setiap hari. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan upaya pengelolaan sampah yaitu melalui penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah Kota Tasikmalaya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir. Sedangkan Pengurangan sampah dilakukan melalui beberapa upaya, yakni: TPS3R mengelola composting dan bank sampah.

Hingga saat ini Kota Tasikmalaya memiliki Tempat Penampungan Akhir (TPA) sebanyak 1 unit, yaitu TPA Ciangir yang berlokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari. TPA ini dibangun pada tahun 2002 dan dioptimalisasikan mulai tahun 2012. TPA yang sudah berusia pakai 10 tahun ini, pengolahan sampahnya masih dilakukan dengan sistem *Open Dumping* dan dikelola UPTD Pengelolaan Sampah, di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Menurut dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, target yang harus dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga Tahun 2025 adalah 70% penanganan dan 30% pengurangan.

Berdasarkan data dari kondisi di atas, Pj. Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E., telah melakukan beberapa langkah nyata untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Pemasangan CCTV sebagai alat monitor di TPS

Dalam upaya penanganan persampahan di tempat pembuangan sampah, baik yang resmi dan tidak resmi, telah dipasang CCTV. Adapun CCTV dipasang di lokasi berikut ini:

- 1) Depo sampah Dadaha
 - 2) Depo sampah Pasar Lama
 - 3) TPA Ciangir
 - 4) Depo sampah Argasari/ Jl. Bantar
 - 5) Depo sampah Perkantoran/ Jl. Ir. H. Juada
 - 6) Depo sampah Eks Terminal Cilembang
 - 7) TPS liar Cigaraja (dekat SDN Nagarawangi)
 - 8) Depo sampah Cikurubuk
 - 9) TPS liar Cigaraja
 - 10) TPS liar Jl. Wasita Kusumah
 - 11) TPS liar Jl. Letjen Mashudi (dekat Simpang Tugu Telkom)
 - 12) TPS liar Jl. Letjen Mashudi (dekat RM. Hera)
 - 13) TPS liar Jl. Gubernur Sewaka (dekat Gudang Kopi Kapal Api)
 - 14) TPS liar Jl. Tamajaya (GI Jawa – Bali)
 - 15) Depo sampah Tanuwijaya
 - 16) TPS liar (arah Kelurahan Nagarasari menuju Cisalak)
2. Membentuk Tim Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik (Satgas Tasik Resik) melalui Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 660.2/Kep. 1109-DLH/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan dari pembentukan Satgas Tasik Resik dibentuk adalah:

- 1) Melaksanakan penanganan sampah pada TPS ilegal di Kota Tasikmalaya.
- 2) Melaksanakan terobosan pengurangan sampah organik dan anorganik di sumbernya untuk mengurangi sampah dan menghasilkan nilai ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- 3) Meningkatkan sinergitas antar lembaga di Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penanganan dan pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya.

Satgas Tasik Resik melibatkan TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, struktur Satgas Tasik Resik sesuai Keputusan Wali Kota Tasikmalaya terdiri dari: Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Gerakan Cepat (POKGERCEP), Kelompok Kerja Kecamatan (POKMAT) dan Kelompok Kerja Kelurahan (POKLUR).

Selanjutnya, setiap pokja memiliki tugas masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja Gerakan Cepat (POKGERCEP)

- ✓ Melaksanakan operasi pembersihan sampah pada Tempat Penyimpanan Sampah (TPS) ilegal sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dalam 1 (satu) bulan.
- ✓ Melaksanakan penegakan hukum dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya.

2) Kelompok Kerja Kecamatan (POKMAT)

- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang dilakukan oleh POKLUR.
- ✓ Melaksanakan pendampingan kegiatan inovasi penanganan sampah pada masing-masing Kelurahan, sesuai kewenangan wilayah kerja.
- ✓ Melaksanakan pendampingan kegiatan edukasi pengurangan sampah pada masing-masing Kelurahan, sesuai kewenangan wilayah kerja.

3) Kelompok Kerja Kelurahan (POKLUR)

- ✓ Menjaga kebersihan pada masing-masing Kelurahan.
- ✓ Memastikan tidak ada tumpukan sampah pada masing-masing Kelurahan.
- ✓ Melaksanakan kegiatan inovasi pengurangan sampah organik dan an-organik pada masing-masing Kelurahan.
- ✓ Melaksanakan edukasi penanganan sampah kepada masyarakat pada masing-masing Kelurahan.

Dalam rangka peluncuran Tim Satgas Tasik Resik tersebut, pada tanggal 29 Desember 2022, Pj. Wali Kota Tasikmalaya menyerahkan gawai untuk Call Centre Satgas Tasik Resik kepada Operator Satgas Tasik Resik yang berfungsi untuk kemudahan Laporan dan Informasi Satgas Tasik Resik dengan nomor 081188897777. Selain itu, untuk pertama kalinya dilakukan apel gabungan Satgas Tasik Resik yang dilanjutkan dengan penanganan sampah pada TPS ilegal di wilayah Kota Tasikmalaya.

4. INOVASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PASCA AKAD NIKAH PENGANTIN TERIMA KARTU KELUARGA DAN KTP-ELEKTRONIK (PASUTRI)

Inovasi PASUTRI ini dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada bulan Desember 2022 sebagai tindaklanjut Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada waktu akad nikah.

Kepemilikan dan pemutakhiran data & dokumen kependudukan setelah perkawinan dalam hal ini Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik masih terdapat penundaan atau tidak langsung diurus oleh masyarakat yang bersangkutan dalam waktu yang cukup lama setelah proses akad nikah. Masyarakat yang sudah melakukan perkawinan, dalam hal mengurus data dan dokumen kependudukannya harus mendatangi kantor Disdukcapil atau kantor kecamatan. Kerjasama Sinergitas dalam hal verifikasi dan validasi data kependudukan.

Maksud dari inovasi PASUTRI yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian pelayanan perubahan data pada dokumen kependudukan masyarakat Kota Tasikmalaya setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Tujuan dari Inovasi PASUTRI adalah memberikan pelayanan prima dengan mempermudah dan mempercepat proses perubahan data pada dokumen kependudukan masyarakat Kota Tasikmalaya setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Ruang Lingkup Inovasi PASUTRI adalah:

- a. Sosialisasi dan penyuluhan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Tasikmalaya;
- b. Mempersiapkan data masyarakat yang sudah melakukan perkawinan, persyaratan perubahan data dan memiliki Buku Nikah yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan verifikasi, mencetak dan menyerahkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-eI) dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Inovasi ini memiliki keuntungan bagi 3 pihak yang terkait, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Masyarakat
 - ✓ Kepemilikan. Memudahkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan baru bagi masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan.
 - ✓ Pemutakhiran. Data dan Dokumen Kependudukan yang sudah update statusnya setelah perkawinan.
 - ✓ Dalam mendapatkan KK & KTP-eI dengan status baru, cukup pemberkasan di KUA.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - ✓ Update Database. Proses langsung data kependudukan masyarakat yang akan melakukan perkawinan.
 - ✓ Minimalisir Antrian. Antrian masyarakat dalam mengurus adminduk dapat diminimalisir karena pemberkasan cukup di KUA.
 - ✓ Kualitas Pelayanan. Dengan layanan Pasutri dapat mendongkrak kualitas layanan Dukcapil.
- c. Kementerian Agama
 - ✓ Verifikasi Data. Terbantu dalam hal verifikasi dan validasi data calon pengantin.
 - ✓ Membangun SIN (Single Identity Number) dari sisi perkawinan.
 - ✓ Mendongkrak kualitas pelayanan Kementerian Agama melalui layanan Pasutri.

Alur Proses Inovasi PASUTRI secara teknis dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

- a. Online/ daring dengan mengakses website <https://simkah4.Kementerian Agama.go.id/>
- b. Offline/ luring dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon (CPP/CPW) datang ke KUA untuk melakukan pendaftaran pernikahan.
 - 2) Petugas KUA melakukan verifikasi dan validasi data pemohon.
 - 3) Wawancara antara petugas KUA dengan pemohon terkait adminduk.
 - ✓ Persyaratan (KTP, KK, Akta Kelahiran).
 - ✓ Mengisi Form Pindah Datang jika salah satu CP berasal dari luar Kota dan akan menetap di Kota Tasikmalaya.
 - 4) Petugas KUA mengirimkan berkas perubahan alamat dan status perkawinan satu hari sebelum akad nikah melalui No WA yang telah ditentukan.
 - 5) Petugas Disdukcapil Memproses pengajuan berkas yang dikirimkan petugas KUA.
 - 6) Dokumen KK dan KTP diserahkan kepada Petugas KUA untuk diberikan kepada pengantin secara bersamaan dengan dokumen Buku Nikah oleh petugas KUA / Petugas dari Disdukcapil.

Gambar 4.7.
Alur Proses Inovasi PASUTRI



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2023

Program PASUTRI Disdukcapil Kota Tasikmalaya ini mulai launching pada 11 Desember 2022 oleh Pj. Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E. Pada kesempatan tersebut, disampaikan

bahwa mulai saat itu, bagi masyarakat Kota Tasikmalaya yang menikah akan langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus yaitu KTP Elektronik, Buku Nikah dan Kartu Keluarga secara gratis. Program ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi terjadinya maladministrasi atau kecurangan di dalam pelayanan kependudukan bagi masyarakat.

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK, dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dengan tembusan kepada Pj. Wali Kota Tasikmalaya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program Prioritas Daerah

Berdasarkan isu strategis dan fokus pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2024 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024, yang memuat rincian tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Pagu Indikatif yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya dan rencana kebutuhan perkiraan maju, serta Perangkat Daerah Pelaksana..

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi rencana aksi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dengan mengacu pada arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab IV.

5.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah

Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan untuk perubahan RKPD Tahun 2024 didasarkan pada pemenuhan dan penyesuaian usulan kegiatan pada RKPD 2024 yang belum dapat dilaksanakan, usulan kegiatan dari pokok-pokok pikiran DPRD serta usulan perubahan rencana kerja dari perangkat daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya baik yang diusulkan melalui pendanaan pada APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. pada Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Dinas Pendidikan	495.015.472.206,00	535.211.093.106,00
2	Dinas Kesehatan	215.956.083.200,00	235.131.907.311,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.565.941.700,00	144.244.254.614,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.623.621.000,00	16.325.204.038,00
5	Satuan Polisi Pamong	16.374.665.080,00	16.374.665.080,00

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Praja		
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.695.789.000,00	10.695.789.000,00
7	Dinas Sosial	20.857.510.600,00	23.209.420.900,00
8	Dinas Tenaga Kerja	7.821.709.200,00	7.821.709.200,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	27.768.662.900,00	29.843.388.150,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	28.958.469.553,00	32.206.817.153,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.848.407.900,00	9.848.407.900,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.519.531.100,00	15.519.531.100,00
13	Dinas Perhubungan	39.064.769.100,00	39.064.769.100,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.706.321.300,00	17.706.321.300,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.243.588.400,00	14.243.588.400,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.995.267.700,00	7.995.267.700,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	17.055.641.100,00	17.179.051.233,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.422.027.100,00	6.422.027.100,00
19	Sekretariat Daerah	30.619.978.214,00	30.619.978.214,00
20	Sekretariat DPRD	61.320.825.400,00	61.834.339.500,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.899.581.600,00	16.899.581.600,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.564.752.900,00	39.908.674.651,00
23	Badan Pendapatan Daerah	24.862.731.700,00	24.862.731.700,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.980.517.000,00	12.980.517.000,00

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
25	Inspektorat	16.324.501.700,00	16.324.501.700,00
26	Kecamatan Cihideung	7.506.889.700,00	7.506.889.700,00
27	Kecamatan Cipedes	6.221.347.500,00	6.221.347.500,00
28	Kecamatan Tawang	7.039.312.800,00	7.039.312.800,00
29	Kecamatan Indihiang	7.551.144.800,00	7.551.144.800,00
30	Kecamatan Kawalu	10.821.983.100,00	10.821.983.100,00
31	Kecamatan Cibeureum	10.122.782.700,00	10.122.782.700,00
32	Kecamatan Tamansari	8.112.578.500,00	8.112.578.500,00
33	Kecamatan Mangkubumi	8.411.611.300,00	8.411.611.300,00
34	Kecamatan Bungursari	8.121.472.400,00	8.121.472.400,00
35	Kecamatan Purbaratu	7.149.672.900,00	7.149.672.900,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.873.928.850,00	58.403.153.730,00
J U M L A H		1.683.628.860.908,00	1.806.357.109.167,00

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan RKPD tahun 2024 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran dan prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2024 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024.
4. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Dalam hal ada kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang belum tertampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, maka dimasukkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang

diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda.

8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2024, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH